

**ANALISA POTENSI EKONOMI PARIWISATA KABUPATEN ACEH
TENGAH PROVINSI ACEH PASCA PEMEKARAN WILAYAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Kebutuhan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh:

Nama : Mellin Aprilliani
Npm : 1705180016
Program Study : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
T.A 2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : MELLIN APRILLIANI
NPM : 1705180016
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISA POTENSI EKONOMI PARIWISATA KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH PASCA PEMEKARAN WILAYAH
Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Penguji I


Dra. ROSWITA HAFNI, SE., M.Si

Penguji II


ERİYANTI NASUTION, S.E., M.Ec

Pembimbing


DRA. HJ. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

TIM PENGUJI

Ketua


H. JANURI, S.E, M.M., M.Si



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MELLIN APRILLIANI
NPM : 1705180016
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISA POTENSI EKONOMI PARIWISATA
KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH
PASCA PEMEKARAN WILAYAH

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing

DRA. HJ. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. PRAWIDYA HARIANI, S.E., M.Si

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl.Kapten Mukhtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mellin Aprilliani
Npm : 1705180016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisa Potensi Ekonomi Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Pasca Pemekaran Wilayah**" adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan

(Mellin Aprilliani)

Abstrak

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang memiliki potensi sektor pariwisata, mulai dari wisata budaya, alam, kesenian, tempat bersejarah. Secara umum potensi wisata yang ada di Aceh Tengah belum mempunyai dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan pariwisata sangat lambat karena anggaran yang dimiliki terbatas dan kurangnya investor yang menanamkan modal untuk mengembangkan pariwisata, serta belum adanya SDM yang profesional, sarana dan prasarana serta manajemen usaha. Perkembangan perekonomian dari sebelum dilakukan pemekaran dan sesudah dilakukannya pemekaran mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik. Begitu juga pembangunan wisata-wisata sudah berkembang baik dengan mengikuti trend kekinian menjadi daya tarik tersendiri hingga mengundang masyarakat daerah maupun luar daerah untuk berwisata di Kabupaten Aceh Tengah.

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu: **“ANALISA POTENSI EKONOMI PARIWISATA KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH PASCA PEMEKARAN WILAYAH”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan Skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

Terima kasih untuk yang istimewa untuk kedua orang tua saya tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan Skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januari S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Prawidya Hariani, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Dra. Roswita Hafni, S.E., M.Si selaku sekretaris program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Hj. Lailan Safina Hsb, M.Si. selaku Dosen dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman pembelajaran kepada penulis, serta staf pegawai yang banyak

membantu penulis selama proses pelaksanaan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Kepada sahabat-sahabat saya khususnya Feby Anisa Urbaningrum, Wahyu Rizky, dan adik saya Amelia Ramadhani yang sudah saling support dan sama-sama berjuang untuk penulisan Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan.

Terimakasih atas semangat, dukungan dan arahan baik yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Skripsi ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang menjadi salah satu syarat penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalammualaikum, Wr. Wb

Medan, Mei 2021
Penulis,

MELLIN APRILLIANI
NPM : 1705180016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	25
1.3 Batasan dan Masalah.....	25
1.4 Tujuan penelitian.....	26
1.5 Manfaat penelitian.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	27
2.1 Uraian Teoritis	27
2.1.1 Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi	27
2.1.2 Ilmu ekonomi dan sumber daya alam	27
2.1.3 Penggunaan Sumber Daya Alam	28
2.1.4 Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi	29
2.1.5 Fungsi Produksi.....	30
2.2 Pariwisata	38
2.2.1 Pembagunan Pariwisata	43
2.2.2 Konsep Pembagunan Daya Tarik Wisata	45
2.2.3 Pengembangan Pariwisata	48
2.2.4 Pemekaran Wilayah	49

2.2.5	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemekaran Wilayah.....	54
2.3	Penelitian Terdahulu	56
2.4	Kerangka Konseptual	58
BAB III METODE PENELITIAN		60
3.1	Pendekatan Penelitian	60
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	60
3.3	Jenis dan Sumber Data	60
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.5	Metode Analisis	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		62
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh	62
4.1.1	Keadaan Geografi	62
4.1.2	Penduduk	62
4.1.3	Objek wisata Kabupaten Aceh Tengah	67
4.2	Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Di Aceh Tengah.....	69
4.1.4	Pemekaran Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.....	69
4.1.5	Perkembangan Perekonomian Daerah Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran	70
4.1.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran.....	78
4.2	Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Sektor Pariwisata Di Kabupaten Aceh Tengah	82

4.3 Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Sektor	
Pariwisata	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
5.1 kesimpulan	104
5.2 Saran 1.....	105
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk (orang) Tahun 2017-2019	4
Tabel 1.2 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang) Tahun 2017-2019	6
Tabel 1.3 Jumlah Tamu Indonesia pada Hotel Non Bintang (Orang)	9
Tabel 1.4 Rata-rata Lama Menginap Tamu Indonesia pada Hotel Non Bintang (Malam)	12
Tabel 1.5 PDRB Kabupaten Aceh Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun (Juta Rupiah) 2017-2019	16
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	56
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah Per Kecamatan (Jiwa) Tahun 2020	62
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019	63
Tabel 4.3 Jumlah Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019	64
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan yang Dilakukan Seminggu Terakhir, TPT dan TPAK di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019	65
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019	66

Tabel 4.6 PDRB Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	69
Tabel 4.7 PDRB Tahun 2000-2003 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	72
Tabel 4.8 Laju Pertumbuhan Pdrb Tahun 2015-2020 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	74
Tabel 4.9 Laju Pertumbuhan Pdrb Tahun 2000-2003 Menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan	76
Tabel 4.10 Daftar Hotel/Losemen/Mess/Penginapan dan Jumlah Tamu Di Kabupaten Aceh Tengah Sebelum Pemekaran Tahun 2000-2003...	81
Tabel 4.11 Daftar Hotel/Losemen/Mess/Penginapan dan Jumlah Tamu Di Kabupaten Aceh Tengah Sesudah Pemekaran Tahun 2017-2019....	83
Tabel 4.12 Daftar Nama Tempat Wisata Di Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran.....	85
Tabel 4.13 Kondisi jalan menuju objek wisata kabupaten aceh tengah tahun 2000-2020.....	87
Tabel 4.14 Sarana Pendukung Sektor Pariwisata Terhadap Pedapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013-2019	87
Tabel 4.15 Retribusi Parkir pada Objek Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013-2019.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB Tahun 2010-2019	3
Gambar 2.1 Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan barang sumber daya	33
Gambar 2.2 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber daya alam	33
Gambar 2.3 Hubungan antara tingkat pertumbuhan dan Tingkat pencemaran..	36
Gambar 2.4 Hubungan antara Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Barang Sumber Daya Alam dan Lingkungan	38
Gambar 2.5 Kerangka Konseptual	58
Gambar 4.1 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran dari tahun 1994-2013	78
Gambar 4.2 Pertumbuhan Pengeluaran Daerah (PD) Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan yang berasal dari sumber daya alam, yang menjadikan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dibidang pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri dan juga pariwisata. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang terkenal dengan keindahan alamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang jumlahnya sekitar 17.503 yang tersebar di Zamrud khatulistiwa, memancarkan aura dan juga daya tarik yang sangat kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara atau asing.

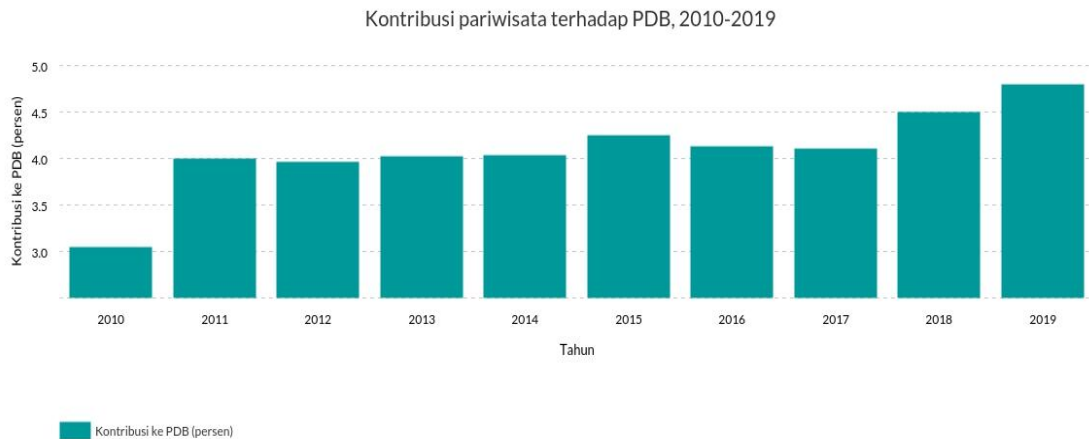
Selama beberapa terakhir ini sampai sebelum terjadinya Covid-19, industri pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Tetapi masih ada hal yang perlu diperhatikan, dimana sampai saat ini belum tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat tentang kesadaran dan pengertian pariwisata, bahwa Indonesia mempunyai keberagaman budaya serta memiliki nilai sejarah yang tinggi (Yuwana, 2010). Pariwisata termasuk dalam service industri yang memiliki alur atau tahapan pengaturan yang cukup panjang, sebab terdiri dari peraturan keberangkatan wisatawan dari negara asal mereka, ke kota atau negara yang menjadi tujuan wisata kemudian proses kepulangan mereka kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai elemen, yaitu travel agent, tour guide, operator tour, akomodasi, restaurant, cafe, maskapai penerbangan, money changer, dan lain sebagainya.

Pemerintah daerah di setiap daerah di Indonesia berkopetensi agar dapat meningkatkan laju perekonomian di daerahnya, termasuk menaikkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu pemasukan daerah yang menggambarkan tingkat otonomi dari suatu daerah. Jika PAD yang diperoleh menunjukkan angka yang besar, maka artinya daerah tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan juga mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Salah satu usaha yang dilakukan agar penerimaan daerah dapat meningkat, yaitu dengan mengoptimalkan potensi pariwisatanya. Bagi pemerintah di suatu negara, dan khususnya pemerintah daerah industri pariwisata merupakan urat nadi bagi perekonomian mereka, karena pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan atau pemasukan yang penting. Devisa bagi suatu negara berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara, selain itu industri pariwisata dapat memberikan sumbangan yang berasal dari pajak rekreasi, pajak hiburan, retribusi penginapan atau villa, dan juga retribusi tempat wisata atau rekreasi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000).

Hubungan atau keterkaitan antara industri pariwisata dengan pendapatan daerah berjalan melalui jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Badrudin (2001) berpendapat bahwa, industri pariwisata dapat menjadi sumber bagi PAD merupakan bidang pariwisata milik masyarakat daerah (Community Tourism Development atau CTD). Keberhasilan dalam memajukan dan mendorong perkembangan industri pariwisata dapat meningkatkan pemasukan daerah, karena pariwisata sebagai salah satu elemen utama dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah tempat-tempat wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang melakukan kunjungan baik wisatawan domestik maupun

mancanegara atau asing, okupansi penginapan pada hotel, pendapatan perkapita, faktor keamanan dan kenyamanan, nilai tukar, serta investasi di bidang pariwisata. (Pariwisata et al., 2020)

Grafik 1.1
Tabel Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB Indonesia
Tahun 2010-2019



Sumber: Kementerian Pariwisata

lokadata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010 hanya berada di poin 3,0 persen di tahun berikutnya yaitu di tahun 2011 mengalami peningkatan berada di 4,0 persen nilai tersebut meningkat naik 1 persen dari 2010 dan posisi menetap sampai tahun 2014 sementara untuk di 2015 mengalami kenaikan 4,3 persen nilai tersebut meningkat 0,20 poin dan selanjutnya mengalami penurunan berada di posisi 4,6 persen mengalami penurunan 0,10 persen di tahun 2016-2017 ditahun 2018 PDB naik dan berada di posisi 4,5 persen 2019 sebesar 4,80 persen. Nilai tersebut meningkat 0,30 poin dibandingkan tahun lalu. Peningkatan kontribusi pariwisata ke PDB didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara, dan investasi.

Tabel 1.1
Tabel Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
Menurut Pintu Masuk (orang) Tahun 2017-2019

Bandara	Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk (Orang)		
	2017	2018	2019
Jumlah	14 039 799	15 810 305	16 106 954
Bandara Lainnya	3 796 962	4 853 089	5 255 742
Batam	1 564 717	1 887 284	1 947 943
Kualanamu	246 551	229 586	244 530
Ngurah Rai	5 682 248	6 025 760	6 239 543
Soekarno Hatta	2 749 321	2 814 586	2 419 196
Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/16/1017/1/jumlah-kedatangan-wisatawan-mancanegara-ke-indo			
Access Time: April 6, 2021, 2:03 pm			

Tabel jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut pintu masuk (orang) ditahun 2017 sampai 2019, dari tabel diatas dapat kita lihat adanya kenaikan jumlah wisatawan terdapat 14.039.799 orang di tahun 2017 dan terdapat 15.810.305 orang di tahun 2018 dan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 16.106.954 orang.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomi, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang meyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan pariwisata perlu didahului dengan kajian yang mendalam, yakni dengan melakukan penelitian terhadap semua sumber daya pendukungnya (Wardiyanta, 2006).

Perkembangan pariwisata sebagai industri merupakan suatu hal yang penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu

sektor yang mempunyai peran penting dalam struktur sumber devisa negara. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pendapatan Produk Domestik Regional Bruto. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan untuk berproduksi, memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain. Berikut ini terdapat tabel yang menampilkan data Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang) Tahun 2017-2019.

Tabel 1.2
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang) Tahun 2017-2019

Provinsi	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang)		
	2017	2018	2019
ACEH	4 410 969	6 518 831	6 677 350
BALI	8 143 614	6 621 617	6 336 447
BANTEN	9 551 703	13 275 125	11 390 512
BENGKULU	1 950 249	2 018 556	2 049 220
DI YOGYAKARTA	6 498 739	7 858 137	7 718 353
DKI JAKARTA	24 840 040	24 967 080	21 683 578
GORONTALO	1 206 547	938 557	764 717
INDONESIA	270 822 003	303 403 888	282 925 854
JAMBI	1 906 593	2 242 802	1 862 760
JAWA BARAT	43 779 162	53 203 387	49 247 753
JAWA TENGAH	41 182 591	43 110 598	39 211 023
JAWA TIMUR	43 689 273	53 244 287	52 081 723
KALIMANTAN BARAT	2 996 380	3 257 024	2 924 941
KALIMANTAN SELATAN	4 300 487	4 520 927	3 344 620
KALIMANTAN TENGAH	2 398 510	2 745 542	2 082 520
KALIMANTAN TIMUR	3 205 261	2 613 107	1 823 000
KALIMANTAN UTARA	728 373	634 477	686 336
KEP. BANGKA BELITUNG	3 831 465	5 197 635	8 835 507
KEP. RIAU	3 805 645	4 611 718	7 904 297
LAMPUNG	6 002 487	6 881 006	6 210 447
MALUKU	863 592	1 206 288	754 528
MALUKU UTARA	513 206	615 624	622 143
NUSA TENGGARA BARAT	4 134 434	3 192 581	2 065 701
NUSA TENGGARA TIMUR	2 856 531	2 947 381	2 865 432
PAPUA	1 117 110	1 354 526	796 440
PAPUA BARAT	581 002	686 836	622 840
RIAU	5 149 936	5 552 920	4 524 315
SULAWESI BARAT	2 119 320	941 944	779 228
SULAWESI SELATAN	8 812 173	9 616 232	8 045 434
SULAWESI TENGAH	3 427 266	2 260 800	1 850 710
SULAWESI TENGGARA	2 963 742	3 370 736	2 028 472
SULAWESI UTARA	2 759 200	4 313 069	3 250 699
SUMATERA BARAT	5 483 028	6 402 187	6 608 377
SUMATERA SELATAN	5 948 669	6 137 095	5 005 476
SUMATERA UTARA	9 364 706	10 345 256	10 270 955

Sumber: Kementerian Pariwisata
Source Url: <https://www.bps.go.id/indicator/16/1189/1/jumlah-perjalanan-wisatawan-n>
Access Time: March 26, 2021, 8:36 pm

Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang) pada keterangan tabel diatas yang bersumberkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara dari tahun 2017-2019 terdapat 5 (lima) posisi provinsi teratas dengan posisi pertama yaitu ada Provinsi Jawa Barat ditahun 2017 terdapat 43.779.162 orang, ditahun 2018 terdapat 53.203.387 orang dan ditahun 2019 mengalami penurunan jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Provinsi

Jawa Barat yaitu tercatat 49.247.753. Dan posisi ke 2 (dua) teratas terdapat Jawa Timur dengan jumlah 43.689.273 orang ditahun 2017 dan ditahun 2018 tercatat 53.244.287 orang dan ditahun 2019 juga mengalami penurunan jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Provinsi Jawa Timur tercatat sebanyak 52.081.723 orang. Di posisi ke 3 (tiga) terdapat Jawa Tengah yang tercatat di tahun 2017 sejumlah 41.182.591 orang, di tahun 2018 tercatat 43.110.598 orang, dan di tahun 2019 juga mengalami penurunan tercatat 39.211.023 orang. Di posisi ke 4 (empat) terdapat Provinsi Banten yang tercatat di tahun 2017 sejumlah 9.551.703 orang, dan di tahun 2018 tercatat 13.275.125 orang dan di tahun 2019 mengalami penurunan jumlah perjalanan wisatawan nusantara yang tercatat 11.309.512 orang. Diposisi ke 5 (lima) terdapat Provinsi Sumatera Utara yang tercatat di tahun 2017 sebanyak 9.364.706 orang, di tahun 2018 terdapat 10.345.256 orang, dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 10.270.955 orang.

Selanjut posisi provinsi terendah dalam Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang) pada keterangan tabel diatas yang bersumberkan dari BPS yaitu pada posisi 4 (empat) terdapat Provinsi Maluku Utara dengan jumlah 513.206 orang ditahun 2017, sedangkan di tahun 2018 tercatat 615.624, mengalami kenaikan di tahun 2019 yang tercatat 622.143 orang. Sedangkan diposisi 3(tiga) terendah terdapat Provinsi Papua Barat dengan jumlah di tahun 2017 sebesar 581,002 orang, dan di tahun 2018 tercatat 686.836 orang, di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 622.143 orang. Di posisi 2(dua) terendah terdapat Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah di tahun 2017 sebesar 728.373 orang dan di tahun 2018 tercatat 634.477 orang sedangkan ditahun 2019 terdapat peningkatan menjadi 686.336 orang. Dan diposisi terendah pertama terdapat Provinsi Maluku dengan

jumlah ditahun 2017 tercatat 863.592 orang dan ditahun 2018 tercatat 1.206.288 orang dan di tahun 2019 ternyata Provinsi Maluku mengalami penurunan jumlah perjalanan wisatawan nusantara menjadi 754.528. Ini lah rangkuman untuk jumlah provinsi tertinggi dan jumlah provinsi terendah dalam kategori data jumlah perjalanan nusantara (orang). Dibawah ini terdapat tabel Data Jumlah Tamu Indonesia Pada Hotel Non Bintang (Orang) Tahun 2017-2019.

Tabel 1.3
Jumlah Tamu Indonesia pada Hotel Non Bintang (Orang)
tahun 2017-2019

Provinsi	Jumlah Tamu Indonesia pada Hotel Non Bintang (Orang)		
	2017	2018	2019
ACEH	1 120 124,19	895 844,00	1 030 136,00
SUMATERA UTARA	4 075 920,47	4 056 188,00	4 850 322,00
SUMATERA BARAT	1 202 554,24	862 927,00	1 167 212,00
RIAU	2 415 264,87	2 137 285,00	1 413 345,00
LAMPUNG	608 022,20	671 658,00	420 600,70

Dari data yang dilampirkan diatas maka dapat kita simpulkan 5 provinsi tertinggi Jumlah Tamu Indonesia Pada Hotel Non Bintang (orang) dari tahun 2017

sampai dengan 2019 dengan posisi provinsi pertama yaitu Jawa Barat ditahun 2017 tercatat 8.625.524,64 dan ditahun 2018 tercatat 8.316.114,00 dan ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi 7.483.742,00 untuk provinsi ini dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan pada jumlah tamu Indonesia pada hotel non bintang. Di posisi kedua terdapat Provinsi Jawa Timur dengan jumlah yang tercatat ditahun 2017 sebesar 7.228.165,22 dan ditahun 2018 sebesar 7.057.695,00 sedangkan ditahun 2019 tercatat sebesar 9.094.596,00 untuk di provinsi ini mengalami kenaikan jumlah tamu Indonesia pada tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2018. Di posisi ke 3 (tiga) terdapat Jawa Tengah, ditahun 2017 terdapat 7.069.511,72 dan ditahun berikutnya 2018 tercatat 7.466.860,00 dan ditahun 2019 Jawa Tengah mengalami penurunan hingga 5.539.721,00. Selanjutnya diposisi ke empat terdapat Provinsi Sumatera Utara ditahun 2017 tercatat 4.075.920,47 dan ditahun 2018 tercatat 4.056.188,00 ditahun 2019 Sumut mengalami peningkatan dan tercatat 4.850.322,00. Dan diposisi ke lima terdapat Provinsi DKI Jakarta di tahun 2017 tercatat 3.172.439,38 dan tahun berikutnya tercatat 4.417.948,00 dan di tahun 2019 tercatat 4.310.569,00. Ini hasil rangkuman 5 Provinsi di Indonesia yang jumlah tamu Indonesia pada hotel non bintang (orang) terbanyak.

Selanjutnya kita melihat dari 5 provinsi terendah di Indonesia dari data yang telah dilampirkan diatas maka di posisi pertama terendah jumlah tamu Indonesia pada hotel non bintang (orang) yaitu Provinsi Gorontalo dengan jumlah ditahun 2017 tercatat 128.896,09 dan di tahun 2018 tercatat 148.557,00 dan di tahun berikutnya 2019 mengalami kenaikan angka yaitu 162.323,90 Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Selanjutnya di posisi ke

dua terdapat Provinsi Kep Bangka Belitung dengan jumlah di tahun 2017 tercatat 209.485,99 dan di tahun 2018 tercatat 185.983,00 mengalami penurunan di tahun 2018 namun di tahun 2019 Provinsi Kep Bangka Belitung mengalami kenaikan jumlah yaitu 212.880,40. Diposisi ketiga terdapat Provinsi Maluku yang tercatat di tahun 2017 yaitu 242.902,11 dan tahun 2018 tercatat 327.935,00 dan di tahun 2019 Provinsi Maluku mengalami kenaikan jumlah yaitu 416.005,90. Diposisi keempat terendah terdapat Provinsi Papua Barat dengan jumlah di tahun 2017 tercatat 266.919,28 dan ditahun 2018 tercatat 295.360,00 lalu di 2019 Papua Barat mengalami penurunan angka dan tercatat jumlah tamu Indonesia pada hotel non bintang (orang) tercatat 23.7191,00. Diposisi terakhir dari data yang disimpulkan dalam 5 provinsi terendah yaitu terdapat Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah data di tahun 2017 yaitu 267.855,03 dan ditahun 2018 Sulawesi Barat tercatat 15.8476,00 jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2017 dan di 2019 Sulawesi Barat mengalami peningkatan angka yaitu tercatat 198.274,80. Dan ini lah rangkuman 5 (lima) provinsi dengan jumlah angka tertinggi dan 5 (lima) jumlah angka terendah untuk tamu Indonesia pada hotel non bintang (orang). Dibawah ini juga terdapat tabel Data Rata-Rata Lama Menginap Tamu Indonesia Pada Hotel Non-Bintang (Malam).

Tabel 1.4
Rata-rata Lama Menginap Tamu Indonesia pada Hotel Non Bintang (Malam)

Provinsi	Rata-rata Lama Menginap Tamu Indonesia pada Hotel Non Bintang (Malam)		
	2017	2018	2019
ACEH	1,58	1,51	1,34
SUMATERA UTARA	1,34	1,34	1,21
SUMATERA BARAT	1,28	1,41	1,31
RIAU	1,56	1,46	1,31
JAMBI	1,89	1,78	1,35
SUMATERA SELATAN	1,52	1,48	1,46
BENGKULU	1,32	1,30	1,34
LAMPUNG	1,41	1,23	1,38
KEP. BANGKA BELITUNG	1,58	1,49	1,33
KEP. RIAU	1,81	1,79	1,52
DKI JAKARTA	1,53	1,79	1,35
JAWA BARAT	1,34	1,28	1,25
JAWA TENGAH	1,14	1,15	1,08
DI YOGYAKARTA	1,37	1,42	1,32
JAWA TIMUR	1,37	1,33	1,25
BANTEN	1,25	1,23	1,12
BALI	2,03	2,13	1,72
NUSA TENGGARA BARAT	1,59	1,55	1,35
NUSA TENGGARA TIMUR	1,84	1,74	1,65
KALIMANTAN BARAT	1,39	1,47	1,33
KALIMANTAN TENGAH	1,40	1,28	1,21
KALIMANTAN SELATAN	1,29	1,61	1,33
KALIMANTAN TIMUR	1,58	1,94	1,59
KALIMANTAN UTARA	1,62	1,50	1,27
SULAWESI UTARA	1,66	1,78	1,56
SULAWESI TENGAH	1,43	1,50	1,41
SULAWESI SELATAN	1,24	1,28	1,41
SULAWESI TENGGARA	1,27	1,27	1,15
GORONTALO	2,35	1,75	1,47
SULAWESI BARAT	1,24	1,52	1,16
MALUKU	1,87	1,69	1,64
MALUKU UTARA	1,88	1,77	1,38
PAPUA BARAT	1,94	2,03	1,82
PAPUA	1,92	1,70	1,50
INDONESIA	1,41	1,44	1,30

Sumber : Survei Hotel Bulanan (VHTS), BPS

Source Url: <https://www.bps.go.id/indicator/16/339/1/rata-rata-lama-menginap-tamu-indonesia-pada-hot>

Access Time: March 26, 2021, 8:41 pm

Dari data yang telah terlampirkan maka kita dapat melihat rata-rata lama menginap untuk tamu Indonesia pada hotel non bintang (malam). Berikut kita golongan 5 (lima) Provinsi dengan jumlah tertinggi Rata-Rata Lama Menginap Tamu Indonesia Pada Hotel Non Bintang (Malam) terdapat diposisi pertama yaitu Provinsi Gorontalo dengan jumlah di tahun 2017 tercatat 2,35 dan ditahun 2018

tercatat 1,75 ditahun 2018 mengalami penurunan jumlah rata-rata lama menginap tamu dan ditahun 2019 tercatat 1,47 ditahun ini juga mengalami penurunan rata-rata lama menginap untuk Provinsi Gorontalo. Selanjutnya di posisi kedua terdapat Provinsi Bali dengan jumlah di tahun 2017 tercatat 2,03 dan di tahun 2018 tercatat 2,13 untuk Provinsi Bali mengalami kenaikan jumlah rata-rata lama menginap tamu selanjutnya untuk ditahun 2019 Provinsi Bali tercatat 1,72 ditahun 2019 Provinsi Bali mengalami penurunan jumlah rata-rata lama menginap tamu Indonesia di hotel non bintang. Di posisi ketiga tertinggi jumlah rata-rata lama menginap tamu terdapat Provinsi Papua Barat dengan jumlah tamu di tahun 2017 tercatat 1,94 dan ditahun 2018 tercatat 2,03 di tahun 2018 ini mengalami kenaikan jumlah tamu dan ditahun 2019 tercatat 1,82 ditahun 2019 Provinsi Papua Barat mengalami penurunan jumlah tamu. Diposisi ke empat terdapat Provinsi Papua dengan jumlah yang tercatat ditahun 2017 sebesar 1,92 dan di tahun 2018 tercatat 1,70 Provinsi ini mengalami penurunan jumlah tamu rata-rata lama menginap dan di tahun 2019 Provinsi Papua juga mengalami penurunan jumlah dengan jumlah yang tercatat 1,50. Di posisi ke lima jumlah rata rata lama menginap tamu Indonesia dihotel non bintang yaitu Provinsi Jambi dengan jumlah di tahun 2017 sebesar 1,89 dan ditahun 2018 Provinsi Jambi tercatat 1,78 Provinsi ini mengalami penurunan ditahun 2018 dan di tahun berikutnya 2019 Provinsi Jambi juga mengalami penurunan jumlah tamu rata-rata lama menginap yang tercatat hanya 1,35. Untuk rangkuman jumlah data terendah rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel non bintang (malam) terdapat diposisi pertama yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah ditahun 2017 yaitu 1,14 dan tahun 2018 tercatat 1,15 selanjutnya ditahun 2019 Provinsi Jawa Tengah tercatat 1,08 provinsi ini mengalami penurunan ditahun

2019. Selanjutnya diposisi ke dua terdapat Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah di tahun 2017 tercatat 1,24 dan ditahun 2018 tercatat 1,28 untuk tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 1,41 provinsi ini mengalami peningkatan jumlah rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada hotel non bintang. Selanjutnya diposisi ketiga terdapat Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah ditahun 2017 tercatat 1,24 dan ditahun 2018 tercatat 1,52 untuk tahun 2019 Provinsi ini tercatat 1,16 yang artiannya pada tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan jumlah rata-rata lama menginap tamu Indonesia. Diposisi ke empat terdapat Provinsi Banten di tahun 2017 Provinsi ini tercatat 1,25 dan ditahun 2018 tercatat 1,23 selanjutnya di tahun 2019 tercatat 1,12 provinsi ini juga mengalami penurunan di tahun 2019. Selanjutnya diposisi terakhir terdapat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah ditahun 2017 yaitu 1,27 dan di tahun 2018 tercatat 1,27 tetap diposisi yang sama dengan 2017 dan ditahun 2019 tercatat 1,15 jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Provinsi Aceh yang merupakan daerah paling barat di Indonesia memiliki destinasi wisata alam, sejarah dan kebudayaan yang luar biasa dan sangat beragam. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh menyatakan kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri ke provinsi Aceh terus meningkat. Pada tahun 2014 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh 1.428.262 orang, dan pada tahun 2015 naik 20,2 persen ke angka 1,717,116 orang. Dari data ini dapat dilihat bahwa perkembangan pariwisata di Provinsi Aceh memiliki tren positif, (Disbudpar Aceh, 2016).

Aceh Tengah sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki banyak tempat wisata dan mempunyai potensi yang sangat besar bagi peningkatan perekonomian

masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Aceh Tengah yang dapat di manfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pemerintah Kabupaten (APBK). Aceh Tengah memiliki potensi besar untuk maju dan berkembang, diantara potensi yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh Kabupaten lain ialah Aceh Tengah memiliki tempat-tempat wisata yang sangat menarik untuk di kunjungi. Kondisi alam yang masih alami, sehingga cocok untuk di jadikan pilihan tempat liburan. Banyak wisatawan yang ingin datang untuk menikmati keindahan alamnya. Salah satu objek wisata yang paling banyak di gemari adalah Danau Lut Tawar yang di dalamnya terdapat jenis ikan endemik yang dikenal dengan nama ikan depik yang populasinya hanya ada di danau Lut Tawar.

Aceh Tengah juga memiliki beberapa peninggalan sejarah yang menjadi legenda masyarakat setempat diantaranya adalah Loyang Koro yang menurut cerita rakyat setempat Goa tersebut dapat menghubungkan antara dua kampung yaitu kampung Toweren dan kampung Isaq yang jaraknya kurang lebih 25km. Selain itu juga terdapat wisata lainnya yaitu Puncak Pantan Terong, yang berada pada ketinggian kurang lebih 1000 mdpl. Pada Objek wisata ini pengunjung dapat menikmati pemandangan kota Takengon secara keseluruhan serta hamparan Danau Lut Tawar. Saat ini objek wisata tersebut mulai banyak di kunjungi oleh para wisatawan mulai dari luar daerah bahkan wisatawan asing.(Universitas et al., 2015).

Tabel 1.5
PDRB Kabupaten Aceh Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun (Juta Rupiah) 2017-2019

PDRB Lapangan Usaha 2010	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)		
	2019	2018	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3174873.70	3101342.50	2932852
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-	-	2556573.50
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	344778
3. Perikanan	-	-	31500.50
B. Pertambangan dan Penggalian	71029.20	70460.10	73875.30
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	0
2. Pertambangan dan Penggalian Non Minyak dan Gas Bumi	-	-	73875.30
C. Industri Pengolahan	134712.20	131722.80	123669
1. Industri Migas	-	-	0
2. Industri Nonmigas	-	-	123669
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6513.60	6305.30.00	5632.70
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3301.40.00	2959.40.00	2690
F. Konstruksi	958321.10	892710.10	829411.60
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	998252.60	970298	897923.70
H. Transportasi dan Pergudangan	263967.40	258522.90	252764.30
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136788.50	117906.20	104397.60
J. Informasi dan Komunikasi	187203.30	176463.30	177888.10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	167021	155041.90	140020.50
L. Real Estate	228015.30	216429.30	201411.70
M,N. Jasa Perusahaan	38940.30	36587.70	34637.20
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	694933.90	677933.60	608500.90
P. Jasa Pendidikan	143289.30	124146.70	113739.70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171854.70	154517.70	143254.60
R,S,T,U. Jasa Lainnya	93428.40	84747.90	79275.60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7472445.90	7178095.40	6721944.80
PDRB NONMIGAS	7472445.90	7178095.40	6721944.80

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Aceh Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019. PDRB terbesar berada pada sektor pertanian,kehutan dan perikan yaitu sebesar Rp 3174837.70

pada tahun 2019. Sedangkan pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terkecil berada pada tahun 2017 yaitu Rp 2690. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada sektor Produk Domestik Regional Bruto yaitu sebesar Rp 7472445.90.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang memiliki potensi tidak kalah menarik dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Kabupaten Aceh Tengah memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi seperti wisata alam, agrowisata, wisata seni dan budaya, dan wisata peninggalan sejarah. Salah satu objek wisata Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi suatu pusat perhatian dalam pengembangannya yaitu Danau Laut Tawar. Selain objek wisata Danau laut tawar, sebenarnya di Kabupaten Aceh Tengah ini masih terdapat berapa obyek wisata yang lain adapun objek wisata tersebut adalah:

1. Berwisata Kabut Di Takengon (Ibu kota Kabupaten Aceh Tengah) wisatawan juga dapat menikmati suasana pagi hari seperti julukannya “negeri diatas awan”. Saat pagi hari wisatawan dapat merasakan bagaimana berada diatas awan dengan udara sejuk sembari menikmati keindahan panorama alam. Saat matahari terbit, Takengon dan sekitarnya masih berselimutkan awan. Berikut beberapa tempat bagi wisatawan yang ingin merasakan berada diatas awan diantaranya jalur Pantan Terong, mulai dari kampung Mongal, Bahgie, Tensaran, Daling hingga puncak, kemudian daerah Bukit Sama, Singgah Mata dan Bukit Menjangan.

2. Danau Laut Tawar

Danau Laut Tawar adalah sebuah danau dan kawasan wisata yang terletak di Dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Nanggröe Aceh Darussalam.

Suku Gayo menyebutnya dengan Danau Lut Tawar. Luasnya kira-kira 5.472 hektar dengan panjang 17 km dan lebar 3,219 km.

3. Pantan Terong

Pantan Terong adalah sebuah bukit yang terletak di puncak bukit dataran tinggi gayo. Di tempat ini kita bisa melihat ibu kota Aceh Tengah dan danau Laut Tawar secara keseluruhan, lapangan pacuan kuda di kecamatan Pegasing, bandara udara Rembele dari atas, dengan diapit serta dikelilingi punggung gunung bukit barisan yang elok. Pantan Terong terletak di kecamatan Bebesan, 7.5 km dari kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

4. Pantai Menye

Pantai Menye (Pantai Manja) adalah sebuah objek wisata yang sangat menarik, pantai Menye Tidak saja tempatnya yang sangat strategis tetapi juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Pantai Menye Terletak di Kecamatan Bintang tepatnya di sebelah timur danau laut tawar. Ada dua rute perjalanan yang bisa dicapai yaitu jalur utara dan selatan. Bila melalui jalur utara Anda bisa melalui Takengon sekitar 18 Km, dan bila melalui jalan selatan jarak tempuhnya agak lebih panjang sekitar 24 Km dengan waktu tempuh 20 sampai 30 menit.

5. Wisata Sejarah

a. Gua Ujung Karang dan Ceruk Mendale Baru-baru ini terkuak asal mula suku gayo dari penelitian dan penggalian sejarah dicerug-cerug atau gua di seputaran Takengon. Dan telah ditemukan kerangka manusia dari ribuan tahun yang lalu dan juga sisa kehidupannya. Gua ini terletak dibawah kaki bukit hanya berjarak sekitar 100 meter dari danau laut tawar dan 30 meter dari jalan pemukiman penduduk kampung Mendale, di lokasi gua ini ditemukan kerangka manusia purba

saat penelitian dan penggalian Tim Balar (Balai Arkeologi Medan) yang wilayah kerja Sumut dan Aceh. Kerangka manusia yang ditemukan tersebut diperkirakan berusia 6500 tahun bahkan ada kerangka yang sudah berusia 7400 tahun. Disini selain wisatawan dapat menikmati wisata sejarah tentu juga dapat menambah wawasan tentang edukasi sejarah. Maka agar lebih menarik lagi jika wisatawan dapat mengunjungi gua ini diantaranya, gua Ujung Karang dan Ceruk Mendale yang berjarak hanya 3 Km dari pusat kota. b. Makam Raja Linge Sedikit keluar dari kota, wisatawan juga bisa menuju ke arah Linge dan Serule melihat sisa-sisa kejayaan dinasti Linge dan Serule pada masa lalu. Di lingkungan makam Raja Linge ini terdapat rumah adat, dengan nama Rumah Pitu Ruang (rumah yang memiliki tujuh pintu) dan sebuah sumur tua yang airnya tidak pernah kering. Disini juga terdapat fasilitas toilet dan musholla. Kecamatan Linge, berjarak tempuh sekitar 70 km dari kota Takengon.

6. Wisata Legenda

Masyarakat Gayo memiliki sangat banyak legenda dan cerita rakyat, diantaranya yang dapat para wisatawan kunjungi adalah: a. Legenda Putri Pukes Mengisahkan tentang sepasang pengantin yang menjadi batu di dalam goa karena tidak mematuhi amanah orang tuanya untuk tidak menoleh kebelakang. Gua putri pukes adalah salah satu obyek wisata di Aceh Tengah yang terletak di kaki bukit kecamatan kebayakan arah menuju ke Nosar kira-kira sekitar 2 Km dari ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Didalam gua putri pukes tersebut terdapat batu yang dipercayai adalah putri pukes yang telah menjadi batu, sumur besar dan kendi yang sudah menjadi batu.

b. Legenda Loyang Koro Merupakan jalur transportasi masyarakat pengembala kerbau pada masa lalu. Goa Loyang Koro adalah salah satu objek wisata goa yang terletak di kaki gunung Birah panyang, sekitar 15 meter dari bibir pantai dengan kedalaman 20 meter. Goa Loyang Koro Terletak di desa Toweren, Kecamatan Laut Tawar, hanya 7 Km dari Kota Takengon.

c. Legenda Batu Belah

Obyek wisata ini terletak di kampung Penaron Kecamatan Linge Takengon, Aceh Tengah.

7. Wisata Adventure (Petualangan)

Ada banyak track adventure di Takengon, untuk wisatawan yang suka tantangan dan menguji adrenalin, maka di Bumi Birah Panyang dan Bumi Kelieten merupakan pilihan yang cocok, wisatawan bisa melihat panorama Danau Laut Tawar dan sekitarnya dari ketinggian, hingga terjun dengan ketinggian bervariasi di Mengaya.

8. Air Terjun Mengaya

Wisata Air Terjun Mengaya ini Terletak di Desa Mengaya, Kec. Bintang. Kabupaten Aceh tengah berdekatan dengan obyek wisata Danau Lut Tawar. Melalui jalan setapak yang sudah beraspal, pengunjung bisa menikmati panorama hutan yang asri dan udara yang sejuk di sepanjang jalan menuju lokasi air terjun ini.

9. Goa Loyang Datu Merah Mege

Goa Loyang Datu Merah Mege adalah Objek wisata yang berpanorama indah, tidak hanya menawarkan keindahannya saja tetapi juga legenda yang mengikutinya. Area objek wisata ini juga dilengkapi dengan tempat peristirahatan dan tempat duduk untuk menikmati air deras yang mengalir didasar Goa. Goa Loyang Datu Merah Mege Terletak 26 km dari ibu kota kabupaten aceh tengah.

10. Wisata Kuliner Terletak di pinggiran jalan Desa One-one.

Tempat ini hanya berjarak 10 menit dari Takengon kecamatan Kebayakan, di desa ini banyak warung yang menyediakan makanan khas Gayo seperti: masakan asam jeng dan pengat, juga makanan lain seperti makanan yang berbahan dasar ikan bawal, mujair, depik dan kepras yang di tangkap langsung dari Danau Laut Tawar, sambal terong cecah agur (makanan khas gayo) selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kuliner kota dingin ini.

11. Wisata Kopi

Wisata kopi ini merupakan andalan dari Kota Takengon, kopi Gayo merupakan salah satu kopi dengan citarasa terbaik di dunia. Sangat tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke Takengon tidak menyeruput kopi Gayo dan tidak mengunjungi kebun kopinya langsung. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berprofesi sebagai petani dan perkebun. Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan salah satu jenis kopi arabika terbaik di dunia dengan luas lahan mencapai 48.300 hektar produksi per hektare ssebanyak 720 kilogram. Salah satu potensi yang ada di Aceh Tengah yaitu kopi gayo merupakan varietas kopi arabika yang menjadi salah satu komoditi unggulan yang berasal dari Dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, Indonesia. Kopi gayo telah mendapatkan Fair Trade Certified dari Organisasi Internasional Fait Trade pada tanggal 27 Mei 2010, kopi gayo menerima

sertifikat IG (Indikasi Geografis) diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Kopi gayo cukup terkenal di dunia karena memiliki aroma dan kenikamatan yang khas dan jika di cupping atau di tes rasa dan aroma di daerah gayo hampir memiliki cita rasa kopi yang ada di seluruh dunia.

12. Wisata Budaya

- a. Pacuan Kuda Tradisional Pada bulan Agustus secara rutin digelar pacuan kuda tradisional di Takengon, dilaksanakan 2 kali dalam setahun, ribuan orang akan tumpah ruah ke lapangan pacuan kuda di Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing.
- b. Mengenal Tari Guel Tari guel adalah salah satu khasanah budaya di Gayo. Konon tari guel yang diiringi irama music dan nyanyian ini, memiliki cerita atau kisah, ketika menaklukkan Gajah Putih yang ada di Rimbaraya kab. Bener Meriah. Guel sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam, lingkungan kemudian dirangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama.

Melihat banyaknya potensi obyek wisata yang ada, begitu juga dengan kesenian dan kebudayaan masyarakat Gayo, maka sangat wajarlah sektor pariwisata ini ditetapkan sebagai andalan dalam mengembangkan daerah tujuan wisata di Kabupaten Aceh Tengah. Apabila semua potensi obyek wisata di atas dikembangkan secara baik dan berkesinambungan serta adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Pasal 15 menyebutkan

bahwa perintisan dan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan daerah pariwisata nasional dan pengembangan daerah. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisatan pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya, memfasilitasi pengembangan daya Tarik wisata baru serta mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Regulasi tersebut seharusnya dapat menjadi landasan utama bagi pemerintah Aceh Tengah dalam membuat berbagai kebijakan yang mendorong pengembangan pariwisata. Objek pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah masih kurang maksimal pengembangannya oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini terjadi karena belum adanya konsep kebijakan pengembangan pariwisata dan pengelolaannya masih kurang koordinasi dan kerja sama baik antara pemerintah kabupaten Aceh Tengah dengan pemilik usaha pariwisata. Kurang maksimalnya pengelolaan dan pengawasan kepariwisataan tersebut sangat berdampak pada kepuasan masyarakat khususnya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Aceh Tengah. Permasalahan lainnya yaitu belum adanya regulasi dan rencana induk pengembangan kawasan pariwisata daerah menjadi penyebab pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum maksimal.

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi

masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy, 2008).

Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang melakukan pemekaran adalah Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten yang beribukota Takengon ini pada tanggal 8 Desember 2003 mengalami pemekaran. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Aceh Tengah secara menyeluruh, yang meliputi: pembagian luas wilayah administrasi, sumber daya, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi wilayah, serta sektor pemerintahan. Dari aspek ekonomi, pemekaran seyogyanya dapat mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Analisa Potensi Ekonomi Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Pasca Pemekaran Wilayah”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kontribusi sektor pariwisata yang masih kecil terhadap pembentukan PDB di Indonesia.
2. Rendahnya pendapatan sektor pariwisata dalam pembentukan PAD di Provinsi Aceh Tengah.
3. Masih sedikitnya jumlah wisatawan baik domestic maupun mancanegara di Kabupaten Aceh Tengah.

1.3 Batasan dan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang diteliti, maka penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu dampak pemekaran wilayah bagi pariwisata Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh terhadap potensi ekonomi daerah.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan bahwa rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah
2. Bagaimanakah dampak pemekaran wilayah terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah
3. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terhadap sektor pariwisata

1.4 Tujuan penelitian

1. Menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah

2. Menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah
3. Menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terhadap sektor pariwisata

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

- a. Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pariwisata
- b. Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topic yang sama
- c. Sebagai tambahan literature terhadap penelitian sebelumnya

2. Manfaat bagi non akademik

- a. Memberikan masukan kepada dinas pariwisata seni dan budaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya pengembangan kawasan pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tengah
- b. Peneliti ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2 Ilmu ekonomi dan sumber daya alam

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, peranan ilmu ekonomi tidak banyak berbeda, karena tersedianya sumber daya alam itu juga relatif terbatas dibanding dengan kebutuhan akan sumber daya alam itu. Dalam hal ini ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang proses bagaimana seseorang atau masyarakat mengambil keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang langka itu. Namun yang lebih menantang ialah ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mampu memberikan informasi yang baik dan berguna dalam pengambilan keputusan, baik untuk pribadi, lebih-lebih untuk pemerintah, ataupun untuk Dewan Perwakilan rakyat.

Setiap aspek yang dibicarakan oleh sub-disiplin ilmu ekonomi tentu menyangkut penggunaan sumber daya alam. Kebijakan ekonomi makro sering kali menyangkut masalah permintaan terhadap barang-barang sumber daya alam baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebaliknya tersedianya serta biaya pengambilan barang sumber daya alam ini mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi makro.

Umumnya setiap keputusan pemerintah selalu memiliki sasaran ganda (*multiobjectives*) dalam penggunaan sumber daya alam seperti untuk pertumbuhan ekonomi, mempertahankan keindahan lingkungan, pemerataan distribusi pendapatan, kekayaan, maupun kekuasaan, serta keinginan untuk membebaskan diri terhadap ketergantungan pada kekuatan asing. Lebih-lebih dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan alternatif pengambilan keputusan dan implikasinya yang harus dapat

diinformasikan kepada masyarakat secara gamblang. Jadi jelasnya ilmu ekonomi sumber daya alam dapat diartikan sebagai ilmu yang memperhatikan baik rencana maupun penilaian terhadap alternatif kebijaksanaan sumber daya alam.

2.1.3 Penggunaan Sumber Daya Alam

Telah diketahui bahwa kita hidup diplanet bumi yang tetap ukurannya, dengan tingkat penggunaan sumber daya alam yang relatif meningkat dan tingkat penyerapan limbah yang relatif tetap. Apabila manusia memulai proses teknologi, dan kota-kota, industri serta pertanian mulai membuang limbah sebagai produk sampingan proses kehidupan dan produksi, maka akan ada tekanan terhadap kemampuan membersihkan secara otomatis yang dipunyai lingkungan alamiah, dan keseimbangan ekologi akan lenyap.

Pada umumnya beban biaya yang timbul karena limbah tadi diletakkan di pundak masyarakat umum, dan bukan si pencipta limbah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah berusaha agar mendapat suatu keadilan, para produsen dan siapa saja yang menghasilkan limbah hendaknya mempertimbangkan perlunya kualitas kehidupan dan mengenali biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Penggunaan sumber daya alam untuk masa datang secara langsung dihubungkan dengan apa yang disebut dengan *imbangan antara penduduk dan sumber daya alam*. Apabila penduduk membutuhkan terlalu banyak sumber daya alam, maka muncullah kebutuhan untuk meningkatkan penggalan sumber daya alam ekstraktif dan meningkatkan permintaan akan sumber daya alam seperti lapangan terbuka, tempat rekreasi, dan udara yang bersih. Namun dampaknya adalah memburuknya kondisi fisik dan dunia ini, dan sayangnya masyarakat sangat

lambat menemukan pemecahan masalah yang timbul itu. Beberapa hal yang menjadi alasan dari lambatnya penyesuaian itu bahwa:

1. masyarakat lebih mengenal adanya kepemilikan pribadi (private) dan mekanisme pasar, sehingga pengertian lingkungan sebagai barang milik bersama dan dipelihara bersama masih sulit dimengerti.
2. Kita tidak mengetahui secara pasti apa yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat itu, demikian pula tentang teknologi untuk menghasilkan apa yang diinginkan tersebut tidak banyak kita ketahui.
3. Karena adanya eksternalitas, maka biaya produksi barang dan jasa sering menjadi tidak jelas, disamping adanya kelambanan dan mobilitas manusia.

2.1.4 Sumber Daya Alam Dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumber daya alam tidak sama dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya barang sumber daya yang dipakai dalam proses produksi. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak barang sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi yang pada gilirannya akan mengurangi tersedianya sumber daya alam yang ada didalam bumi karena barang sumber daya itu harus diambil dan tempat persediaan (stock) sumber daya alam.

Jadi dengan semakin menggebu-gebutnya pembangunan ekonomi dinegara yang sedang berkembang termasuk negara kita Indonesia karena merasa tertinggal dari negara lain dan ingin menghilangkan kemiskinan di negara tersebut, maka akan berarti semakin banyak barang sumber daya yang diambil dari dalam bumi dan semakin sedikit lah jumlah persediaan sumber daya alam tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan ada hubungan yang positif antara jumlah dan kuantitas

barang sumber daya dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya ada hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Disamping itu dengan pembangunan ekonomi yang cepat yang dibarengi dengan pembangunann pabrik, akan tercipta pula pencemaran lingkungan yang semakin membahayakan kehidupan manusia.

2.1.5 Fungsi Produksi

Kalau kita membicarakan soal pertumbuhan ekonomi, maka akan terlihat dengan masalah peningkatan luaran (*output*) yang terus menerus dalam jangka panjang. Peningkatan luaran ini tergantung pada macam dan jumlah masukan (*input*) atau faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara luaran dan masukan ini disebut dengan fungsi produksi. Secara garis besar faktor produksi atau masukan yang dipakai untuk meningkatkan luaran yang berupa produksi barang dan jasa dalam perekonomian dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja, modal atau kapital, tanah dan sumber daya alam lainnya, teknologi dan faktor sosial seperti sistem pemerintahan, adat istiadat, agama dan lain sebagainya.

Secara matematis dapat kita tuliskan:

$$Y = f(L, K, R, T, S)$$

Di mana:

Y = Jumlah Produksi Nasional

L = Jumlah Tenaga Kerja

K = Kapital

R = Jumlah Sumber Daya Alam

T = Teknologi

S = Faktor Sosial

Masing-masing masukan mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat produksi nasional, artinya semakin banyak jumlah faktor produksi atau masukan itu digunakan akan semakin tinggi tingkat produksi. Anggapan yang digunakan disini bahwa masing-masing faktor produksi itu bersifat homogen.

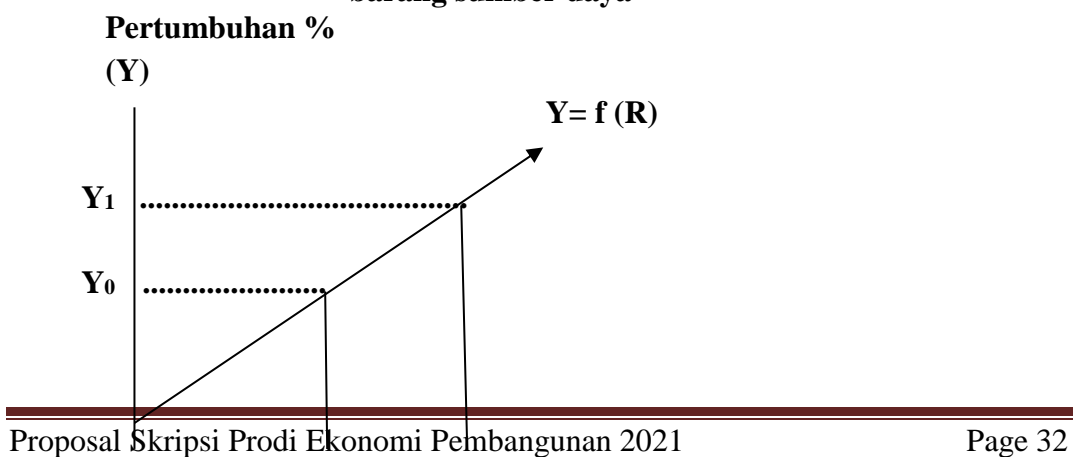
Sering kali dalam salah satu fungsi produksi hanya dituliskan bahwa produk nasional bruto merupakan fungsi dari kapital dan tenaga kerja. Namun yang dimaksud dengan kapital disini sudah mencakup sumber daya tanah dan sumber daya alam. Hal ini dapat kita mengerti karena pada umumnya tanah atau sumber daya alam tanpa aplikasi kapital tidak banyak berarti bagi peningkatan produksi barang atau jasa. Di samping itu tanah dan sumber daya alam tersebut relatif konstan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, layaklah bila tanah dianggap sebagai bagian dari kapital.

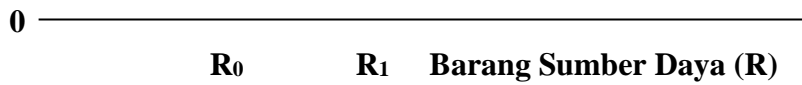
Tetapi bila diteliti secara mendalam, tanah dan sumber daya alam merupakan faktor yang sangat menentukan bagi proses pembangunan ekonomi suatu negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki tanah yang subur sangatlah mungkin memiliki tingkat produktivitas pertanian yang tinggi pada tahap awal dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas pertanian akan sangat mempengaruhi perkembangan sektor-sektor lain seperti sektor industri dan jasa pada tahap perkembangan ekonomi lebih lanjut.

Pada umumnya orang menerangkan bahwa kemunduran suatu perekonomian ataupun adanya kesempatan untuk berkembang bagi suatu masyarakat dapat dilihat dari tersedianya sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Bahkan sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan bahwa suatu negaramengalami kemiskinan karena tidak cukupnya sumber daya alam yang

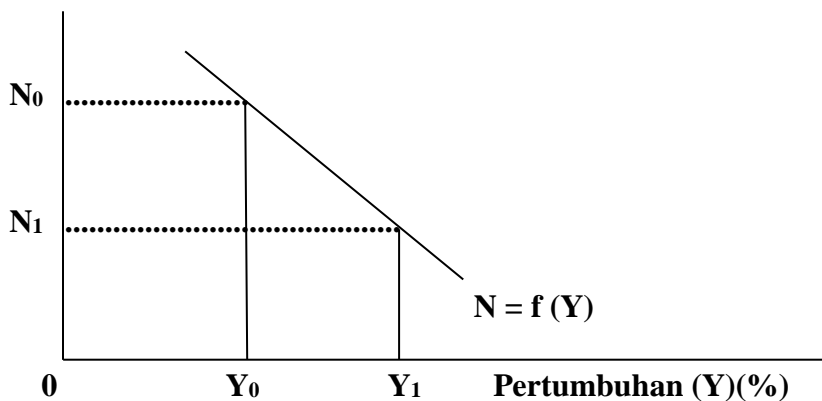
dimilikinya. Memang benar terbatasnya tingkat output di negara yang pendapatannya rendah antara lain disebabkan oleh terbatasnya sumber daya alam yang tersedia, baik dalam arti kuantitas maupun jenisnya. Tanpa adanya sumber alam yang minimum di negara itu, maka akan tidak banyak harapan untuk adanya perkembangan ekonomi. Alam sekitarnya membatasi kemungkinan usaha manusia untuk hidup dan mencapai sesuatu. Tetapi jumlah dan kualitas sumber daya alam riil yang dipunyai oleh suatu negara atau suatu daerah itu lebih merupakan hasil dari pada sebab perkembangan ekonomi. Dengan kata lain justru dengan berhasilnya pembangunan ekonomi akan semakin banyak sumber daya alam yang dapat digali dan selanjutnya akan mendorong pembangunan lebih lanjut.

Gambar 2.1
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan
barang sumber daya





Gambar 2.2
Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan
Sumber daya alam



Gambar 2.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang digambarkan pada sumbu vertikal merupakan fungsi dari tersedianya barang sumber daya yang digambarkan pada sumbu horizontal. Kurva $Y = f(R)$ menunjukkan adanya hubungan positif yang artinya bila jumlah barang sumber daya yang dipakai dalam proses produksi bertambah maka perekonomian juga berkembang lebih maju. Misalnya dalam Gambar 2.1 dapat dilihat bila jumlah barang sumber daya yang dipakai dalam perekonomian setinggi R_0 , maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan setinggi Y_0 dan bila jumlah barang sumber daya alam yang dipakai bertambah menjadi R_1 , maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi yaitu menjadi Y_1 .

Sedangkan Gambar 2.2 menunjukkan bahwa jumlah persediaan sumber daya alam (N) merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi (Y), dan di sini

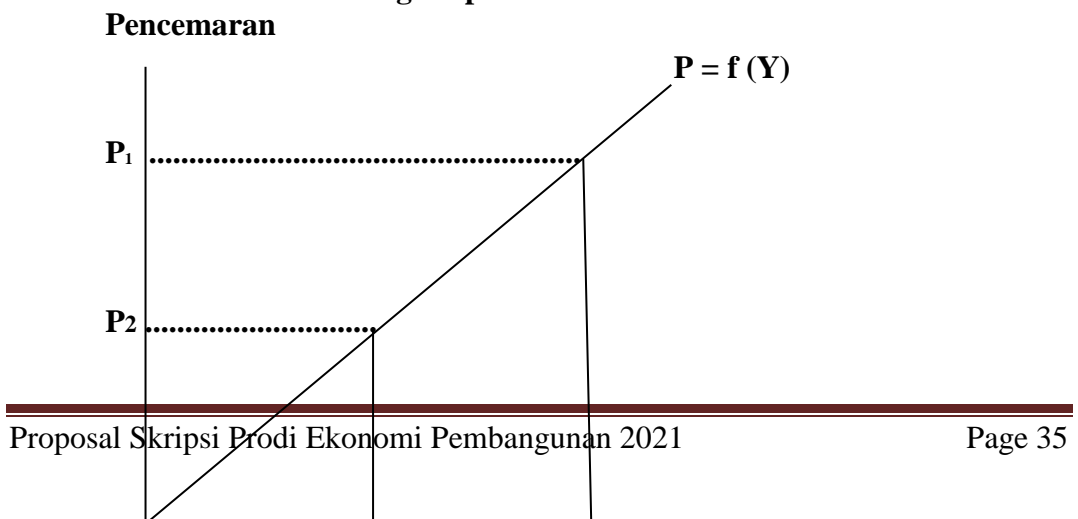
terdapat hubungan yang negatif artinya semakin cepat pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian akan semakin menipis tersedianya sumber daya alam di negara yang bersangkutan. Dalam Gambar 2.2 ditunjukkan pada saat pertumbuhan ekonomi setinggi Y_0 %, maka jumlah persediaan sumber daya alam adalah N_0 dan bila laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi Y_1 %, maka jumlah persediaan sumber daya alam menurun menjadi N_1 .

Uraian di atas memberikan pengertian mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan suatu proyek yang tidak menimbulkan pencemaran. Ada dua pola penting dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yakni pola pembangunan yang didasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan pola pembangunan yang didasarkan atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam RUTR harus ditentukan pola kemampuan tanah, curah hujan dan letak tanah, agar bila pembangunan dilaksanakan tidak terjadi erosi misalnya. Pola tersebut dipengaruhi oleh lingkungan alam yang menjadi titik tolak dibentuknya zonasi atau kawasan lingkungan. Sedangkan dengan AMDAL harus dilakukan studi kelayakan baik teknis, lingkungan, maupun sosial ekonomis untuk menentukan ambang batas pencemaran bila didirikan suatu proyek. Jadi pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang memperlakukan sumber daya alam dengan melihat hasil positif maupun negatifnya. Produksi barang dan jasa merupakan basil positif, sedangkan limbah dan sampah merupakan hasil negatif. Dengan demikian justru hasil yang negatif itulah yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Sumber daya alami sebagai suatu persediaan (stock) ada pada setiap saat dan persediaan ini meningkat dengan adanya penemuan baru, serta berkurang dengan adanya penggunaan atau pengambilan sumber daya alam itu. Di samping itu sumber daya alam juga akan berkurang apabila terjadi kerusakan alamiah, seperti usang ataupun kehancuran lainnya. Telah disinggung di muka mengenai peranan sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi. Barang sumber daya alam dikombinasikan dengan faktor produksi lain seperti kapital, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam arti peningkatan jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam suatu negara guna memenuhi kebutuhan penduduk yang selalu meningkat jumlahnya. Jangan sampai laju tambahan jumlah penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan produksi barang dan jasa. Apabila laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan barang dan jasa, maka tingkat kesejahteraan atau tingkat hidup dapat dikatakan menurun, dan hal ini tidak dikehendaki oleh kita semua, khususnya untuk negara-negara yang sedang berkembang.

Gambar 2.3
Hubungan antara tingkat pertumbuhan dan
Tingkat pencemaran

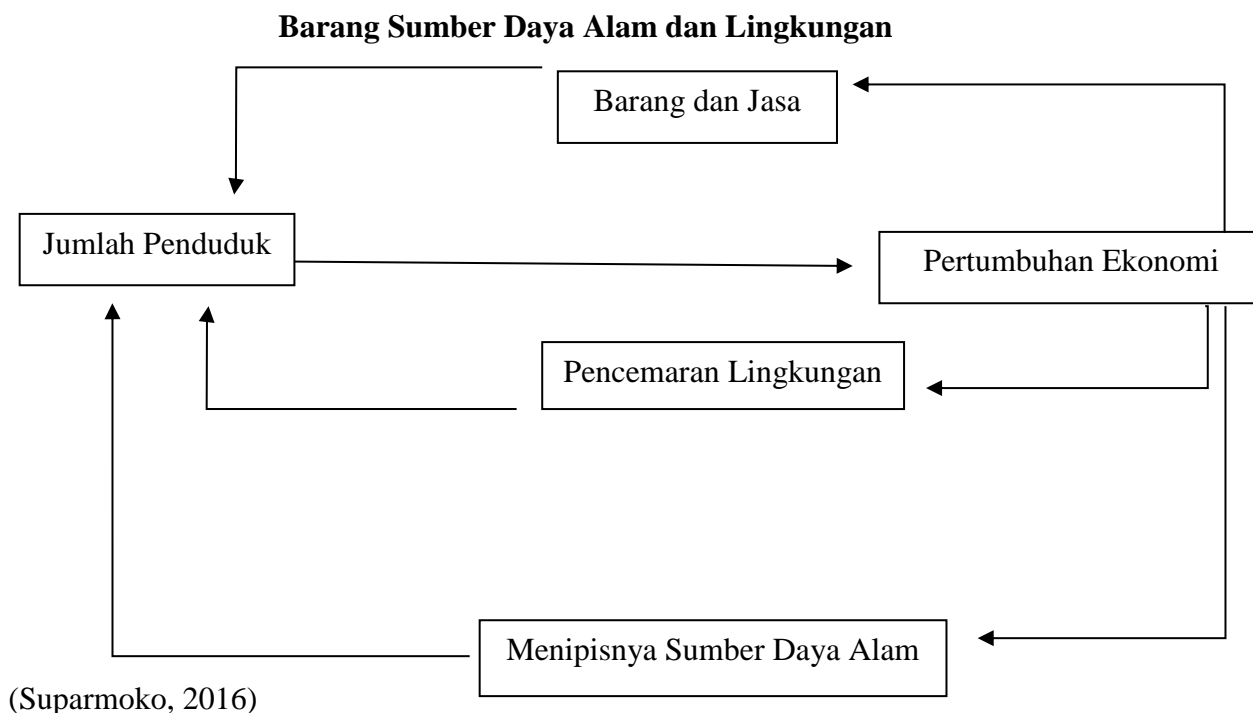


kesejahteraan hidup penduduk. (Lihat pula Gambar 2.4). Oleh karena itu, sebelum suatu proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk dilaksanakan, analisa dampak, lingkungan (ANDAL) sangat diperlukan. Hubungan antara jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, barang sumber daya, barang sumber daya alam dan lingkungan dapat dilukiskan sebagai berikut (Gambar 2.4).

Dengan berkembangnya jumlah penduduk, perekonomian harus lebih banyak menyediakan barang dan jasa demi mempertahankan atau mempertinggi taraf hidup suatu bangsa. Namun peningkatan produksi barang dan jasa akan menuntut lebih banyak produksi barang sumber daya alam yang harus digali atau diambil dari persediaan sumber daya alam. Sebagai akibatnya sumber daya alam menjadi semakin menipis. Di samping itu pencemaran lingkungan semakin meningkat pula dengan semakin lajunya pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi pula dua macam akibat yaitu di satu pihak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia (ini berupa semakin tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian) dan di lain pihak terdapat dampak negatif bagi kehidupan manusia yang berupa pencemaran lingkungan dan menipisnya persediaan sumber daya alam.

Pencemaran lingkungan menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan dan kurang nyamannya kehidupan, sedangkan berkurangnya persediaan sumber daya alam akan mengurangi kemudahan dalam penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi haruslah bersifat pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tidak menguras sumber daya alam.

Gambar 2.4
Hubungan antara Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi,



2.2 Pariwisata

Kata “Pariwisata” berasal dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* bearti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan *wisata* bearti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata bearti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan kata Bahasa Indonesia untuk istilah *Tourism* dalam Bahasa Inggris (Muljadi,2009). Menurut Suwanto (1997), istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempatnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin tahu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha yang lainnya.

World Tourism Organization (WTO) dan *International Union of Office Travel Organization (IUOTO)* mendefinisikan wisatawan sebagai setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi lebih dari 6 (enam) bulan ditempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: (1) berlibur, rekreasi, dan olahraga, (2) bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, atau kegiatan keagamaan. Adapun Badan Pusat Statistik mendefinisikan pelancong sebagai setiap pengunjung yang tinggal kurang dari 24 jam ditempat yang dikunjunginya.

Pariwisata berdasarkan pengertian *World tourism and Travel Council* (WTCC) adalah merupakan seluruh kegiatan orang yang melakukan perjalanan dan tinggal disuatu tempat diluar lingkungan kesehariannya dalam jangka waktu tidak lebih dari setahun untuk bersantai, bisnis dan lainnya. Adapun Pendit Baruddin (2011) menyatakan bahwa pariwisata terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti wisata budaya, wisata kesehatan, wisata kuliner, wisata pendidikan, wisata keagamaan, wisata bisnis, wisata industri, wisata konvensi, wisata politik, wisata sosial, wisata bulan madu, wisata cagar alam, wisata penelitian, wisata bahari, dan wisata petualangan. Pariwisata sudah diakui sebagai industri besar dapat dilihat dari sumbangan terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja (Pitana & Gayatri, 2005), sedangkan dalam menjalankan kegiatannya, pariwisata dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Baik sisi permintaan maupun sisi penawaran merupakan ruang lingkup dari kegiatan ekonomi pariwisata yang saling berinteraksi satu sama lain.

Perjalanan wisata yang dilakukan oleh orang-orang tertentu tidak akan terjadi apabila tidak ada hal yang mendasarinya. Ada hal-hal yang mendorong dan menggeserkan orang-orang itu melakukan perjalanan wisata. Menurut Mc Intosh dalam Suwena & widyatmaja (2008) ada empat motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu kegiatan kepariwisataan:

1) Motivasi untuk memenuhi kebutuhan fisik

Motivasi ini berhubungan dengan penyegaraan tubuh dan pikiran, tujuan kesehatan, olahraga, dan bersenang-senang. Motivasi ini berhubungan dengan segala kegiatan yang berfungsi mengurangi segala ketegangan.

2) Motivasi untuk mengenal budaya

Motivasi ini diidentifikasi dengan keinginan untuk melihat dan mengetahui lebih banyak tentang budaya negara lain baik itu tari-tariannya cara berpakaian, music, kesenian, dan cerita rakyat.

3) Motivasi untuk berhubungan dengan orang lain

Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang baru, mengunjungi teman dan keluarga yang jauh, dan mencari pengalaman baru yang berbeda. Berwisata dengan tujuan untuk melepaskan diri hubungan yang rutin para teman dan tetangga dimana mereka berasal.

4) Motivasi untuk memperoleh status dan prestasi

Motivasi-motivasi ini dikaitkan dengan keinginan seorang agar mereka dihargai, dihormati dan dikagumi dalam rangka memenuhi ambisi pribadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, obyek daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Jadi obyek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa

dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Dalam membangun obyek dan daya tarik wisata tersebut harus diperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya setempat, nilai-nilai agama, adat istiadat, lingkungan hidup, beserta obyek dan daya tarik wisata itu sendiri. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh pemerintah, badan usaha dan perseorangan. Penggolongan jenis obyek wisata akan terlihat dari ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata. Obyek wisata dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Obyek wisata alam, misalnya : pantai, laut, gunung berapi, danau, sungai, fauna (langka), flora (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam, dan lain-lain.
- b. Obyek wisata budaya, misalnya : Upacara kelahiran, tari-tari(tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, baguanan bersejarah, peninggalan tradisional, fertival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tadisional), adat istiadat lokal, museum, dan lain-lain.
- c. Obyek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan(layangan), hiburan (lawak/akrobatik dan sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain. (Andi Mappi S, 2001: 30-33)

Ditinjau dari segi ekonomi pemberian klasifikasi tentang jenis pariwisata dianggap penting karena dengan cara itu dapat di tentukan berapa penghasilan devisa yang diterima dari suatu pariwisata yang dikembangkan disuatu tempat atau

daerah tertentu. Adapun jenis wisata yang telah dikenal dimasa ini antara lain menurut (Pendit, N. S 1994)

1. Wisata Budaya Wisata Budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain, mempelajari keadaan rakyat dan kebiasaan adat istiadat, budaya dan seni mereka.
2. Wisata Konvensi Wisata konvensi adalah wisata yang menyediakan fasilitas bangunan dengan ruang-ruang tempat bersidang bagi peserta konverensi, atau pertemuan lainnya yang bersifat nasional maupun internasioanal.
3. Wisata Sosial Wisata sosial adalah perorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberikan kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti misalnya kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.
4. Wisata Cagur Alam Wisata Cagur Alam adalah wisata yang diselenggarakan agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pengunungan dan sebagainya yang pelestariannya dilindungi oleh Undang-undang
5. Wisata Bulan Madu Wisata Bulan Madu adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu, dengan fasilitas-fasilitas khusus, tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjunga mereka.

Pengolongan obyek wisata menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, bahwa obyek wisata dan daya tarik wisata terdiri dari :

1. Obyek dan daya tarik ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
2. Obyek dan daya tarik hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata argo, wisata tirta, wisata pertualangan alam, taman rekreasi dan taman hiburan.

2.2.1 Pembangunan Pariwisata

Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010-2025, dalam peraturan pemerintah ini yang di maksud dengan :

- a. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
- b. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengadlan, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

Jadi disimpulkan, penggunaan pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana prasarana, Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.

Tujuan penggunaan kepariwisataan nasional adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
- b. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.

- c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
- d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mengsinergikan Pembagunan Destinasi Pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pembagunaan pariwisata meliputi keadaan sosial dan memiliki dampak terhadap sosial ekonomim, adapun dampak sosial ekonomi yaitu :

- a) Kondisi Sosial Ekonomi Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Menurut (Seorjono Soekanto, 2001) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajiban dalam berhubungan dengan sumber daya. Berdasarkan bebrapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengertian keadaan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan pemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis tempat tinggal.
- b) Dampak Terhadap Sosial Ekonomi
 - a. Dampak terhadap penerimaan devisa
 - b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
 - c. Dampak terhadap kesempatan kerja
 - d. Dampak terhadap harga-harga
 - e. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
 - f. Damapak terhadap kepemilikan dan control
 - g. Dampak terhadap pembagunaan pada umumnya

h. Dampak terhadap pendapatan pemerintah

2.2.2 Konsep Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pengembangan kepariwisataan dapat diidentifikasi secara khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Santoso, 2006:23). Menurut Yoeti (2005), berkembangnya suatu obyek wisata tergantung pada proses produksi industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi. Negara yang sadar akan pengembangan pariwisata berdasarkan Direktorat Jenderal pariwisata biasa mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh sehingga seluruh bagi pengembangan pariwisata diperhitungkan dengan memperhatikan pola perhitungan untung rugi apabila dibandingkan dengan pembagunan sektor lain.
2. Pengembangan pariwisata harus di integrasikan ke dalam pola dan program pembagunaan semasa ekonomi, fisik dan sosial suatu Negara.
3. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga membawakan kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.
4. Pengembangan pariwisata harus sadar lingkungan sehingga pengembangan yang mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan alam suatu Negara, bukanya justru merusak lingkungan alam dan budaya yang khas itu.
5. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga pertentangan sosial dapat dicegah seminimal mungkin dan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang positif.

6. Penentuan tata cara pelaksanaannya harus disusun sejelas-jelasnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masak sesuai kemampuan.
7. Pencatatan (monitoring) secara terus-menerus mengenai pengaruh pariwisata terhadap suatu masyarakat dan lingkungan sehingga merupakan perubahan yang baik meluruskan kembali akibat perkembangan pariwisata yang merugikan sehingga merupakan sarana pengendalian pengembangan yang terarah.

Pengembangan potensi daya tarik / atraksi wilayah meliputi daya tarik alami yang bersifat melekat (inherent) dengan keberadaan obyek wisata alam tersebut. Selain daya tarik alami, suatu obyek wisata memiliki daya tarik buatan manusia (man made attraction). Unsur-unsur pengembangan pariwisata meliputi :

1. Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora, fauna, sifat khas, perairan, laut, danau), obyek buatan manusia (museum, katedral, mesjid, makam kuno, dan sebagainya), pariwisata budaya (kesenian, adat-istiadat, makanan dan sebagainya).
2. Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Disamping itu perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, jika angkutan dengan kereta api bersifat liner, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan mobil arah perjalanan akan menjadi lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam (dan waktu yang lebih singkat)
3. Akomodasi Tempat menginap dapat dibedakan antara untuk keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan) dan

yang diadakan khusus perorangan untuk menampung atau menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu terbatas.

4. Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjualan makanan, warung minuman/jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (Pramuniaga/pembantu penjualan, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko prabot, rumah tangga), lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi, pemadam kebakaran), dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut memnyangkut juga jasa penjualan barang mewah.
5. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api) tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah.

2.2.3 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial dan pengembangan disektor lainnya, maka didalam pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah salah suatu proses yang terjadi secara

terus-menerus, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap ancaman yang ada untuk dapat berkembang dalam mencapai tujuan individu dalam organisasi dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dalam pembangunan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. beberapa prinsip perencanaan pariwisata, diantaranya :

1. Perencanaan harus memiliki suatu kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari penggunaan perekonomian suatu negara.
2. Perencanaan pengembangan kepariwisataan menghendaki pendekatan terpadu dengan sektor-sektor lainnya, terutama sektor pertanian, jasa, perdagangan, serta sektor transportasi.
3. Perencanaan suatu daerah tujuan pariwisata harus berdasarkan suatu studi yang khusus dibuat untuk daerah tersebut dan dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam serta budaya di daerah yang bersangkutan.
4. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata tidak hanya memperhatikan segi administrasi saja tetapi juga di dasarkan atas penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar, faktor geografis dan teknologi dari daerah yang bersangkutan.

Dalam melakukan pengembangan kepariwisataan, perlu dilakukan penekanan terhadap organisasi pariwisata yang ada (baik pemerintah, masyarakat, dan swasta) serta pihak-pihak terkait guna mendukung kelangsungan pembangunan pariwisata di daerah tersebut (Dermantoto, 2008). Oleh karena itu, dalam perencanaan kepariwisataan dibutuhkan perumusan yang cermat dan diambil kata sepakat, apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan mana yang menjadi tanggung jawab pihak swasta, sehingga dalam pengembangan selanjutnya tidak terjadi

tumpah tindih yang dapat menimbulkan perbedaan antara suatu pihak dengan pihak yang lain.

2.2.4 Pemekaran Wilayah

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.1UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”¹⁴ Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”. Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:
 1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
 2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
 3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal

maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

4. Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang dibentuk diperlukan keseimbangan antara basis sumberdaya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok di masa yang akandatang. Selanjutnya, dalam usaha pembentukan wilayah pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif masyarakat di suatu wilayah pemekaran.

Pada prinsipnya pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian dan perkembangan antar sektor, memperkuat integrasi nasional. Untuk mencapai tujuan itu semua perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena 25 peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mendukung dalam pengembangan wilayah didaerah. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses akumulasi dan utilisasi modal manusia telah terbukti memiliki peran strategis bagi upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Ini menjelaskan pentingnya penerapan dan penegakan strategi manajemen sumber daya manusia yang berorientasi investasi sumberdaya manusia pada level organisasi sehingga mampu berkontribusi bagi peningkatan daya saing bangsa secara berkesinambungan.

Salah satu hambatan yang cukup serius yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota baru hasil dari pemekaran daerah yaitu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat belum sesuai kualitas kerja aparatur dengan apa yang diinginkan masyarakat, kurang tersedianya tenaga manusia dalam hal ini sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan bidang kerjanya, kurang terampilnya aparatur pemerintah daerah dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dan kondisi kapasitas administratif pegawai yang tidak memadai. Maka dari pada itu perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia aparatur karena dapat meningkatkan kemampuan aparatur baik kemampuan profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdianya sehingga padaakhirnyaakan meningkatkan kinerja seorang aparatur

Proses pembangunan sebenarnya adalah suatu perubahan sosial budaya, agar pembangunan menjadi proses yang dapat bergerak maju perlu dilakukan atas kekuatan sendiri (self sustaining proses) tergantung kepadamanusia dan struktur sosialnya. Pembangunan bukan hanya dikonsepsikansebagai usaha pemerintah

Dalam banyak teori pembangunan menyebut beberapa teori, yaitu Growth theory, rural development Theory, Agro first, Basic needsdan sebagainya. Teori pembangunan ini memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang

berusaha menangani masalah keterbelakangan. Dengan demikian tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, tetapi yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul berbagai pendekatan menyangkut kajian tentang pembangunan. Salah satu diantaranya adalah mengenai pembangunan wilayah. Secara luas pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pemekaran Wilayah

Eugene Bardach di dalam bukunya yang sangat provokatif yaitu *The Implementation Game* menyatakan bahwa sulit untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap sebagai klien.² Bardach bermaksud melukiskan kesulitan-kesulitan dalam mencapai kesepakatan di dalam proses kebijakan publik dan menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat pada pelaksanaan kerja serta pemindahan dari tujuan yang disepakati ke proses pencapaian tujuan tersebut. Jones sendiri menilai bahwa dalam Implementasi Kebijakan, pergeseran atau pemindahan yang dimaksudkan oleh Bardach tadi merupakan

salah satu masa tenggang yang populer dalam proses kebijakan publik, yaitu pergeseran dari aspek politik ke aspek administrasi. Dengan demikian cukup penting untuk diakui bahwa tidak ada gambaran yang jelas tentang kebijakan umum di dalam praktik. Pada bagian akhir dari penjelasannya, Bardach juga mengatakan bahwa proses kesepakatan untuk menyetujui suatu program tertentu jarang memecahkan masalah yang memuaskan bagi setiap orang. Hogwood dan Gunn menyatakan secara garis besar menjelaskan bahwa kegagalan suatu kebijakan (policy failure) dapat dikelompokkan menjadi dua katagori. Pertama, yaitu tidak terimplementasikannya kebijakan itu (non implementation gap) dan Implementasi Kebijakan yang tidak berhasil (unsuccesfull implementation). Tidak terimplementasinya kebijakan berarti bahwa suatu kebijakan tidak berjalan sesuai dengan harapan, bahkan bisa diakibatkan karena pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi tidak bersedia bekerjasama, atau sedemikian luasnya jangkauan yang ingin dicapai oleh kebijakan. Masih menurut Hogwood dan Gunn, agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik maka harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini yaitu:

1. kondisi eksternal yang dihadapi organisasi dan instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan dan kendala;
2. untuk melaksanakan kebijakan harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai;
3. keterpaduan antar sumber daya yaitu manusia, dana dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya;

4. kebijakan yang di implementasikan harus didasari hubungan kausalitas yang erat;
5. hubungan kausalitas harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. hubungan saling ketergantungan harus kecil pemahaman yang mendalam;
7. kesepakatan terhadap tujuan;
8. tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat;
9. komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan 10. pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan kewenangan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam rangka memformulasikan penelitian tentang Implementasi Kebijakan hal terpenting adalah merancang dan mengidentifikasi variabel-variabel yang dianggap penting, kemudian menetapkan variabel mana yang paling mempengaruhi dalam menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan. Masih menurut kedua ahli tadi, Sabatier dan Mazmanian, bahwa variabel-variabel yang dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu kebijakan adalah sebagai berikut:

1. mudah atau tidaknya masalah yang akan dikerjakan;
2. kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat Proses implementasi kebijakan; dan
3. pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
-----------------	------------------	----------	------------------

<p>Skripsi dari Unggul Sitanggang 077003031/Pwd</p>	<p>Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten Terhadap Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Samosir</p>	<p>Pemekaran Kabupaten</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran daerah berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir, dengan adanya kemajuan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasana, serta kelembagaan pembangunan. Dampak pemekaran Kabupaten Samosir juga mampu memperbaiki sektor kepariwisataan, diantaranya semakin lengkap dan terjangkaunya sarana penginapan wisatawan, sarana transportasi darat yang memadai, pelayanan dan perawatan yang memuaskan. Perkembangan kepariwisataan memperlihatkan adanya lokasi wisata yang dibangun oleh masyarakat, investor maupun pemerintah daerah.</p>
<p>Evaída Ulfha Aunies, Prof. Dr. Abubakar Hamzah, Prof. Dr. Mohd Nur Syecalad, MS</p>	<p>Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Wilayah</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Variabel pengeluaran daerah dan IPM mempunyai pengaruh positif dan signifikan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan potensi daerah Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh</p>

			Tengah, diperlukan kemampuan, kecermatan serta kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga dapat menciptakan keadaan ekonomi, politik, dan hukum yang kondusif sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi
Widya Fransiska Febriati	Analisa Potensi Pariwisata Pada Kampung Kapiten Di Palembang	Potensi Pariwisata	Bangunan lama yang memiliki sejarah sudah selayaknya dilindungi. Dengan ditetapkannya menjadi objek wisata, keberadaan bangunan tersebut semakin meyakinkan untuk dilestarikan sebagai bagian dari program revitalisasi kota. Keberhasilan program ini ditentukan oleh kerjasama berbagai pihak baik masyarakat, swasta, dan pemerintah.
<i>Iwan Bicer, Eddy Gunawan</i>	Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah	Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kunjungan Wisatawan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Tengah, penelitian ini menggunakan variabel jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan nusantara sebagai variabel bebas dan PDRB sebagai pengukur

			<p>pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>ordinary least square</i> (OLS). Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah wisatawan nusantara berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Tengah.</p>
--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam konsep ini akan disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.5
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diolah baik secara kualitatif dan diinterpretasikan secara deskriptif. Data sekunder diperoleh dari kantor dinas pariwisata dan kantor badan pusat statistik kabupaten aceh tengah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder meliputi jumlah kunjungan wisatawan, gambaran umum, serta informasi lain yang menunjang penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Budaya dan Pariwisata Di Kabupaten Aceh Tengah, buku referensi, jurnal, internet, dan studi pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait serta sumber lain yang dapat menunjang penelitian yang ingin dicapai.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode analisis kuantitatif adalah pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder dimana data dianalisis secara deskriptif kemudian disajikan dengan bantuan diagram atau kurva.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh

4.1.1 Keadaan Geografi

Daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di tengah Provinsi Aceh yang biasa di sebut Takengon Kabupaten Aceh Tengah memiliki iklim tropis, di mana musim kemarau biasanya jatuh pada Bulan Januari sampai dengan Juli, Musim hujan berlangsung dari Bulan Agustus sampai Bulan Desember. Rata-rata curah hujan berkisar antara 1.082 sampai dengan 2.409 Milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan antara 113 sampai dengan 160 hari

per tahun. Suhu udara maksimum rata – rata adalah 260 °C dan minimum 150 °C.

Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata–rata kelembaban 80 %.

Adapun kabupaten Aceh tengah terdiri dari 14 kecamatan yaitu:

- Kecamatan linge
- Kecamatan atu lintang
- Kecamatan jagong jeget
- Kecamatan bintang
- Kecamatan lot tawar
- Kecamatan kebayakan
- Kecamatan pegasing
- Kecamatan bies
- Kecamatan bebesen
- Kecamatan kute panang
- Kecamatan silih nara
- Kecamatan ketol
- Kecamatan celala
- Kecamatan rusep antara

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah :

- Utara : Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen
- Selatan: Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues
- Timur : Kabupaten Aceh Timur
- Barat : Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat

4.1.2 Penduduk

Penduduk yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah umumnya bersuku Gayo, dimana mayoritas beragama Islam. Untuk melihat data penduduk (jiwa) menurut golongan kelompok umur dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah Per Kecamatan (Jiwa) Tahun 2020

Kecamatan Aceh Tengah	Jumlah (jiwa)
Silih Nara	24.581
Rusip Antara	8.586
Pegasing	22.733
Lot Tawar	19.664
Linge	11.201
Kute Panang	8.400
Ketol	14.928
Kebayakan	17.900
Jagong Jeget	10.352
Celala	10.297
Bintang	10.773
Bies	8.162
Bebesen	41.010
Atu Lintang	6.989
Aceh Tengah	215.576

Sumber: BPS Kab. Aceh Tengah

Dari tabel 4.1 dapat dilihat jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 yaitu 215.576 jiwa, di antara 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 41.010 jiwa, dan diantara 14 kecamatan itu terdapat pula kecamatan dengan jumlah penduduk yang sedikit yaitu Kecamatan Atu Lintang dengan jumlah penduduk sebanyak 6.989 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
0-4	11867	11511
5-9	12023	11847
10-14	10258	10196
15-19	8467	8237

20-24	8364	7902
25-29	9186	9178
30-34	9808	9723
35-39	8820	8710
40-44	7551	7057
45-49	6199	5847
50-54	4691	4499
55-59	3557	3662
60-64	2694	2699
65-69	1960	1757
70-74	906	1026
75+	957	1335
Total	107308	105186

Sumber: BPS Kab. Aceh Tengah

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 dengan total jumlah penduduk laki-laki sebanyak 107.308 jiwa dan perempuan sebanyak 105.186 jiwa bahwa mayoritas jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Aceh Tengah tercatat dari 14 kecamatan dengan jumlah penduduk yang berusia 5-9 tahun dengan jumlah laki-laki sebanyak 12.023 jiwa dan perempuan sebanyak 11.847 jiwa. Sedangkan untuk jumlah usia penduduk minoritas adalah berusia 70-74 tahun dengan jumlah laki-laki sebanyak 906 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1026 jiwa. Dapat kita bandingkan dengan tabel 4.1 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 yaitu 215.576 jiwa sedangkan pada tabel 4.2 jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 dengan hasil total keseluruhan dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan tercatat 212.494 jiwa maka dapat disimpulkan di Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan jumlah penduduk di tahun 2020 sebanyak 3.082 jiwa.

Tabel 4.3

Jumlah Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019

Pendidikan Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Penduduk 15 Tahun Ke Atas
Sekolah Dasar Dan Tidak Sekolah	22660	11241	33901
Smp	23359	13253	36612
Sma Umum	36130	10484	46614
Sma Kejuruan	6443	1604	8047
Diploma L/LI/LII	4173	811	4984
Universitas	12990	2177	15167
Total	105755	39570	145325

Sumber: BPS Kab. Aceh Tengah

Berdasarkan tabel diatas bahwa mayoritas jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 yaitu pendidikan yang ditamatkan SMP dengan angkatan kerja sebanyak 23.359, bukan angkatan kerja sebanyak 13.253 dan penduduk 15 tahun keatas sebanyak 36.612. sedangkan minoritas pendidikan yang ditamatkan yaitu Diploma L/LI/LII dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 4.173, bukan angkatan kerja sebanyak 811, dan penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 4984. Dengan totalan jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah yaitu jumlah angkatan kerja sebanyak 105.755, bukan angkatan kerja sebanyak 39.570, dan penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 145.325

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan yang Dilakukan Seminggu Terakhir, TPT dan TPAK di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019

Kegiatan Seminggu Terakhir	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas
Bekerja	102.948
Pengangguran	2.807
Sekolah	9.891
Mengurus Rumah Tangga	23.756
Lainnya	5.923
Total	145.325
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,77

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,65
------------------------------------	------

Sumber: BPS Kab. Aceh Tengah

Data diatas melampirkan tentang jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan yang dilakukan seminggu terakhir, TPT dan TPAK di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2019, kegiatan seminggu terakhir dengan bekerja berjumlah 102.948 penduduk, sedangkan pengangguran terdapan 2.807 penduduk. Dengan totalan jumlah penduduk 145.325 terbagi menjadi 2 yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dengan total 72.77 persen dan pengangguran terbuka sebanyak 2,65 persen.

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019

Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Pertanian	57.669
Pertambangan	0
Industri	4.435
Listrik	93
Bangunan	5.519
Perdagangan	13.820
Transportasi	983
Keuangan	1.075
Jasa	19.354
Total	102 948

Sumber: BPS Kab. Aceh Tengah

Dari tabel 4.5 diatas menjelaskan tentang jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha pekerjaan utama Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019. Dapat kita lihat rata-rata mayoritas Kabupaten Aceh Tengah bekerja sebagai petani dengan jumlah 57.669 penduduk, dan bekerja sebagai jasa sebanyak 19.354 penduduk, selanjutnya Kabupaten Aceh Tengah juga banyak bekerja sebagai pedagang yaitu dengan jumlah 13.820 penduduk.

4.1.3 Objek wisata kabupaten aceh tengah

Aceh tengah merupakan salah satu kabupaten yang terletak sekitar 314,3 kilometer dari Ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh atau sekitar 6-7 jam perjalanan darat. Kabupaten Aceh Tengah memiliki ibu kota Kabupaten Bernama Takengon, namun masyarakat Takengon lebih sering menyebut Aceh Tengah dengan sebutan Gayo karna pada umumnya masyarakat di wilayah tersebut menggunakan bahasa Gayo. Ada beberapa destinasi populer yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ialah:

1. Danau laut tawar

Bukan hanya sebatas objek wisata di Takengon tapi danau ini juga menjadi sumber air paling penting di Aceh Tengah. Dimana saluran irigasi untuk ribuan hektare sawah berasal dari Danau Laut Tawar ini. Selain ada keindahan danau saat ada di tempat ini terdapat panorama perbukitan yang tak kalah cantik. Tempat yang pas untuk beraktifitas bersama seluruh anggota keluarga.

2. Gunung Berapi Burni Telong

Tak jauh dari Danau Laut Tawar terdapat satu gunung berapi yang begitu mempesona. Wajar kemudian banyak pendaki untuk mencoba berada di puncak

gunung yang eksotis ini. Jalur trekking telah tersedia cukup baik. Mereka yang pemula pun bisa ikut mencoba merasakan sensasi di puncak gunung.

3. Pantan terong

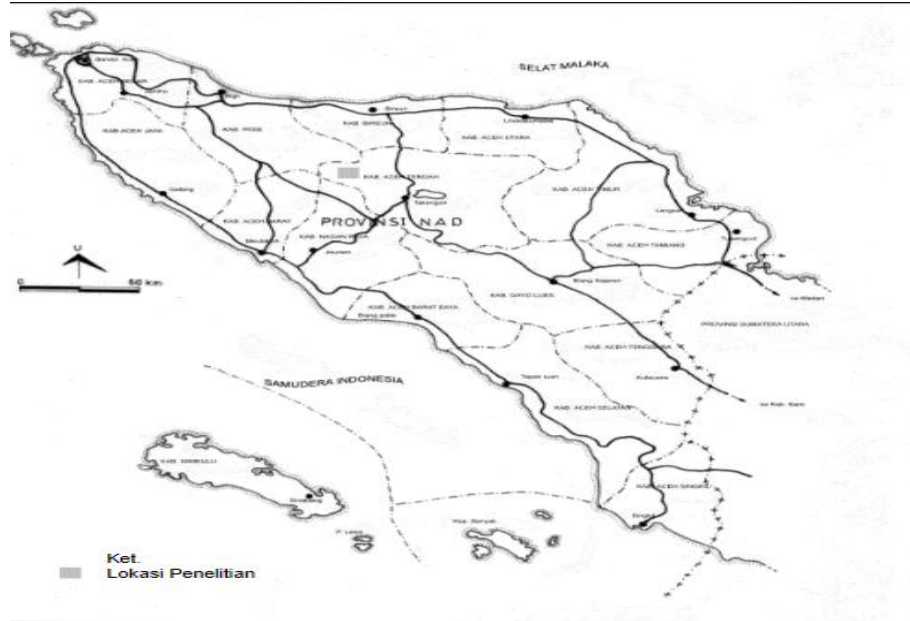
Bukit dengan ketinggian 1.350 meter diatas permukaan laut ini bisa menjadi alternatif. Tak jauh dari pusat kota menjadi alasan tempat ini tak pernah sepi. Hanya dalam beberapa menit saja wisatawan bisa tiba di lokasi Waktu paling tepat untuk berkunjung pada pagi dan sore. Dalam kondisi cerah tanpa kabut dan awan wisatawan bisa melihat keindahan kota Takengon dengan jelas.

4. Arung jeram lukub badak

Arung Jeram Lukub Badak ini berada di Desa Sanehen, Kecamatan Silih Nara. Dari pusat kota lokasinya tidak begitu jauh karena bisa ditempuh dalam beberapa menit perjalanan saja. Saat menyusuri sungai dengan arus deras ini bukan hanya menantang adrenalin. Lebih dari itu ada panorama di sepanjang perjalanan.

4.2 Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Di Aceh Tengah

4.2.1 Pemekaran Wilayah Kabupaten Aceh Tengah



Luas wilayah Sebelum pemekaran	± 577.248,48Ha	Luas wilayah Sesudah pemekaran	±445.404.13Ha
Jumlah penduduk sebelum pemekaran	260.070 jiwa	Jumlah penduduk sesudah pemekaran	212,494 jiwa
Letak geografis terletak pada 04010' 33" – 05057' 50" LU dan 950 15' 40" – 970 20' 25" BT			
Batas administratif sebelum pemekaran		Batas administratif sesudah pemekaran	
Sebelah Utara :Bireuen		Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah, dan Bireuen	
Sebelah Selatan : Gayo Lues dan Nagan Raya		Sebelah Selatan : Gayo Lues dan Nagan Raya	
Sebelah Timur : Aceh Timur		Sebelah Timur : Aceh Timur	
Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat dan Pidie.		Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat dan Pidie.	

Sumber: BPS Kab. Aceh Tengah

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2002 tanggal 23 November 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Baru Bernama Kabupaten Bener Meriah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13/KPTS/DPRD/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Persetujuan dan Dukungan Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bener Meriah Pemekaran Dari Kabupaten Aceh Tengah, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bener Meriah sebagai Daerah Otonom.(Ekonomi et al., 2019)

4.2.2 Perkembangan Perekonomian Daerah Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran

TABEL 4.6
PDRB TAHUN 2015-2020 ATAS DASAR HARGA KONSTAN
MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.207.047,5	2.276.454,1	2.356.131,4	2.437.451,7	2.476.800,1	2.449.187,9
B	Pertambangan dan Penggalan	67.625,5	70.108,6	62.962,5	59.608,9	60.594,3	61.048,3
C	Industri Pengolahan	69.918,1	75.061,9	81.900,7	85.652,9	88.126,2	88.559,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.790,2	5.228,7	5.588,7	6.073,7	6.529,3	6.642,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.641,9	1.769,5	1.856,4	1.941,4	2.093,4	2.045,8
F	Konstruksi	677.228,3	714.611,3	735.934,2	770.223,5	814.385,6	831.729,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	597.257,8	626.705,4	648.352,1	679.531,1	724.947,9	701.224,5
H	Transportasi dan Pergudangan	221.964,4	224.284,9	227.097,8	230.500,8	233.735,1	182.514,7

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.309,9	67.213,3	73.480,2	78.548,8	87.931,3	81.186,8
J	Informasi dan Komunikasi	140.618,9	146.897,2	152.744,7	157.114,4	160.828,3	182.034,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	87.273,2	94.110,2	98.165,3	104.635,2	111.238,2	111.431,7
L	Real Estate	142.580,7	148.637,8	155.664,3	161.500,3	162.489,3	162.500,2
M,N	Jasa Perusahaan	25.080,8	25.739,8	26.527,2	27.200,3	29.374,0	29.035,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	413.012,3	453.846,4	489.513,1	527.033,3	543.924,0	537.284,2
P	Jasa Pendidikan	81.635,5	84.946,1	92.791,2	97.943,7	105.392,4	105.400,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111.091,0	120.227,9	132.187,8	141.193,5	149.927,4	156.023,5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.972.052,4	5.200.044,3	5.410.437,4	5.638.960,0	5.836.845,0	5.766.448,1

Sumber: BPS Kab. Aceh Tengah

Dari data diatas dapat disimpulkan dengan simbol berwarna (kuning) yaitu jumlah pdrb tahun 2015-2020 atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dengan 3 sektor penyumbang tertinggi yaitu tahun 2015 sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 2.207.047,5. Sektor kontruksi sebesar 677.228,3. Sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 597.257,8. Tahun 2016 sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 2.276.454,1. Sektor kontruksi sebesar 714.611,3 . Sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 626.705,4. Tahun 2017 sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 2.356.131,4 . Sektor kontruksi sebesar 735.934,2 . Sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 648.352,1. Tahun 2018 sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 2.437.451,7. Sektor kontruksi sebesar 770.223,5. Sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 679.531,1. Tahun 2019 sektor pertanian kehutanan dan

perikanan sebesar 2.476.800,1. Sektor konstruksi sebesar 814.385,6. Sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 724.947,9. Tahun 2020 sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 2.449.187,9. Sektor konstruksi sebesar 831.729,2. Sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 701.224,5. Adapun data yang berwarna (merah) yaitu jumlah pdrb tahun 2015-2020 atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dengan 3 sektor penyumbang terendah yaitu tahun 2015 sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1.641,9. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4.790,2. Sektor jasa perusahaan 25.080,8. Tahun 2016 sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1.769,5. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5.228,7. Sektor jasa perusahaan 25.739,8. Tahun 2017 sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1.856,4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5.588,7. Sektor jasa perusahaan 26.527,2. Tahun 2018 sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1.941,4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6.073,7. Sektor jasa perusahaan 27.200,3. Tahun 2019 sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2.093,4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6.529,3. Sektor jasa perusahaan 29.374,0. Tahun 2020 sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2.045,8. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6.642,4. Sektor jasa perusahaan 29.035,1. Selanjutnya dapat melihat data PDRB tahun 2000-2003 atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha sebelum dilakukan pemekaran wilayah:

TABEL 4.7

**PDRB TAHUN 2000-2003 ATAS DASAR HARGA KONSTAN
MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)**

Lapangan usaha	2000	2001	2002	2003
1.Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	370,845.50	374,140.29	382,382.81	391,611.28
2.Pertambangan dan Penggalian	5,491.79	5,631.83	5,834.24	6,083.64
3.Industri Pengolahan	17,494.59	17,616.42	18,055.41	19,384.54
4.Listrik dan Air Minum	3,800.03	3,842.38	3,943.67	4,060.62
5.Bangunan/Kontruksi	78,986.77	80,669.75	83,919.50	87,878.41
6.Perdagangan, Hotel dan Restoran	77,685.16	80,289.57	85,026.58	86,702.23
7.Pengangkutan dan Komunikasi	44,120.83	44,854.65	46,634.03	48,740.82
8.Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,547.22	8,163.12	8,352.09	9,533.39
9.Jasa-Jasa	96,010.20	97,922.82	99,727.89	102,140.96
9.1 Pemerintahan Umum	89,932.65	91,762.92	93,504.83	95,660.89
9.2 Sosial Kemasyarakatan	3,557.45	3,598.42	3,605.39	3,764.17
9.3 Hiburan, Rekreasi, dan Kebudayaan	1,037.15	1,047.31	1,066.12	1,098.90
9.4 Perorangan dan Rumah Tangga	1,482.94	1,514.17	1,551.55	1,617.00
PDRB KONSTAN	701,982.09	713,129.84	733,886.22	756,135.99

Sumber: BPS Kab. Aceh Tengah

Dari tabel diatas dapat kita lihat tabel yang berwarna kuning menunjukan nilai sektor tertinggi, dan tabel yang berwarna merah menunjukan nilai sektor terendah adapun 3 sektor tertinggi pada tahun 2000 yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 370,845.50 sektor jasa-jasa lain sebesar 96,010.20 sektor bangunan/kontruksi sebesar 78.986,77 sedangkan 3 sektor terendahnya pada tahun 2000 yaitu listrik dan air minum 3,800.03 pertambangan dan penggalian sebesar 5,491.79 sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 7,547.22. pada tahun 2001 3 sektor tertingginya yaitu pertanian kehutanan dan perikanan 374,140.29 sektor jasa-jasa lainnya sebesar 97,922.82 selanjutnya bangunan

kontruksi 80,669.75 sedangkan 3 sektor terendahnya yaitu sektor listrik dan air minum sebesar 3,842.38 sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,631.83 sektor keuangan dan persewaan jasa perusahaan sebesar 8,163.12. pada tahun 2002 terdapat 3 sektor tertingginya yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 382,382.81 sektor jasa-jasa sebesar 99,727.89 sektor perdagangan hotel dan restoran 85,026.58 sedangkan 3 sektor terendahnya yaitu sektor listrik dan air minum sebesar 3,943.67 sektor pertambangan dan penggalian 5,834.24 sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 8,352.09. pada tahun 2003 terdapat 3 penyumbang sektor terbanyak yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 391,611.28 sektor jasa-jasa sebesar 102,140.96 sektor bangunan kontruksi 87,878.41 sedangkan 3 sektor penyumbang terkecil yaitu sektor listrik dan air minum sebesar 4,060.62 sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,083.64 terakhir sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 9,533.39. Berikutnya terdapat tabel laju pertumbuhan PDRB sebelum dan sesudah pemekaran dibawah ini:

TABEL 4.8**LAJU PERTUMBUHAN PDRB TAHUN 2015-2020 MENURUT
LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,81	3,14	3,50	3,45	1,61	-1,11
B	Pertambangan dan Penggalian	2,32	3,67	-10,19	-5,33	1,65	0,75
C	Industri Pengolahan	4,49	7,36	9,11	4,58	2,89	0,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,42	9,15	6,89	8,68	7,50	1,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,63	7,77	4,91	4,58	7,83	-2,27
F	Konstruksi	8,51	5,52	2,98	4,66	5,73	2,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,36	4,93	3,45	4,81	6,68	-3,27
H	Transportasi dan Pergudangan	2,06	1,05	1,25	1,50	1,40	-21,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,33	7,87	9,32	6,90	11,94	-7,67
J	Informasi dan Komunikasi	4,26	4,46	3,98	2,86	2,36	13,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,94	7,83	4,31	6,59	6,31	0,17
L	Real Estate	2,79	4,25	4,73	3,75	0,61	0,01
M,N	Jasa Perusahaan	2,21	2,63	3,06	2,54	7,99	-1,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,68	9,89	7,86	7,66	3,20	-1,22
P	Jasa Pendidikan	2,33	4,06	9,24	5,55	7,61	0,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	8,22	9,95	6,81	6,19	4,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,54	5,29	8,31	4,70	7,86	0,09
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,23	4,59	4,05	4,22	3,51	-1,21

Sumber: BPS Kab. Aceh Tengah

Dari data diatas dapat disimpulkan dengan simbol berwarna (kuning) yaitu jumlah laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha terbanyak pada tahun 2015 terdapat 3 sektor penyumbang tertinggi sektor konstruksi sebesar 8,51, sektor pengadaan listrik dan gas 7,42, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,68. Pada tahun 2016 penyumbang tertinggi yaitu

sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,89, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 9,15, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,22. Pada tahun 2017 terdapat sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,95, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 9,32, sektor jasa pendidikan 9,24. Pada tahun 2018 sektor pengadaan listrik dan gas 8,68, penyediaan akomodasi makan dan minum 6,90, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,81. Tahun 2019 penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 11,94, sektor jasa dan perusahaan 7,99, sektor jasa lainnya 7,86. Tahun 2020 sektor informasi dan komunikasi sebesar 13,19, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 4,07, sektor konstruksi. Adapun data yang berwarna (merah) yaitu laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha terendah terdapat sektor 3 penyumbang terendah di tahun 2015 terdapat sektor transportasi dan pergudangan sebesar 2,06, sektor jasa perusahaan 2,21, sektor pertambangan dan penggalan sebesar 2,32. Tahun 2016 terdapat sektor transportasi 1,05, sektor jasa perusahaan sebesar 2,63, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,14. Tahun 2017 terdapat sektor pertambangan dan penggalan sebesar -10,19, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,25, sektor konstruksi sebesar 2,98. Tahun 2018 terdapat sektor pertambangan dan penggalan sebesar -5,33, sektor jasa perusahaan sebesar 2,54, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,50. Tahun 2019 terdapat sektor real estate sebesar 0,61, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,40, sektor pertanian perhutanan dan perikanan sebesar 1,61. Tahun 2020 terdapat sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar -1,11, sektor jasa perusahaan sebesar -1,15, sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar

-1,22. Berikut ini dapat kita lihat Laju Pertumbuhan Pdrb Tahun 2000-2003

Menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan sebelum pemekaran wilayah:

TABEL 4.9

**LAJU PERTUMBUHAN PDRB TAHUN 2000-2003 MENURUT
LAPANGAN USAHA atas dasar Harga Konstan**

Lapangan usaha	2000	2001	2002	2003
1.Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	100.00	100.89	103.11	105.60
2.Pertambangan dan Penggalian	100.00	102.55	106.24	110.78
3.Industri Pengolahan	100.00	100.70	103.26	110.80
4.Listrik dan Air Minum	100.00	101.09	103.78	106.86
5.Bangunan/Kontruksi	100.00	102.13	106.25	111.26
6.Perdagangan, Hotel dan Restoran	100.00	103.35	109.45	111.61
7.Pengangkutan dan Komunikasi	100.00	101.66	105.70	110.47
8.Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	100.00	108.16	110.66	126.32
9.Jasa-Jasa	100.00	101.99	103.67	106.39
9.1 Pemerintahan Umum	100.00	102.04	103.97	106.37
9.2 Sosial Kemasyarakatan	100.00	101.15	101.35	105.81
9.3 Hiburan, Rekreasi, dan Kebudayaan	100.00	100.98	102.79	105.95
9.4 Perorangan dan Rumah Tangga	100.00	102.11	104.63	109.94
PDRB KONSTAN	100.00	101.59	104.54	107.71

Sumber: BPS Kab. Aceh Tengah

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan tabel yang diberi warna kuning yaitu jumlah sektor penyumbang tertinggi dan warna merah jumlah sektor terendah. Pada tahun 2000 seluruh sektor menyumbang dengan nilai yang sama sebesar 100.00. Pada tahun 2001 terdapat 3 penyumbang sektor tertinggi yaitu keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 108.16 selanjutnya terdapat sektor perdagangan hotel

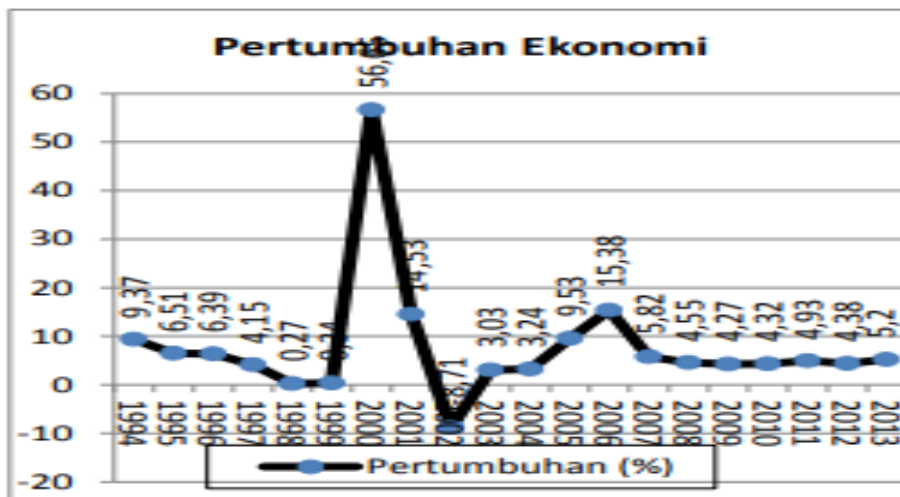
dan restoran sebesar 103.35 dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 102.35, selanjutnya terdapat 3 sektor penyumbang dengan nilai terkecil yaitu sektor industri pengolahan sebesar 100,70. Sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 100.89 selanjutnya terdapat sektor listrik dan air minum sebesar 101,09. Pada tahun 2002 penyumbang tertingginya yaitu sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 110.66. sektor perdagangan hotel dan restoran 109.45 selanjutnya sektor bangunan konstruksi sebesar 106.25 dan 3 sektor terendahnya yaitu pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 103.11, sektor industri pengolahan 103.26 selanjutnya sektor jasa-jasa lainnya sebesar 103.67. Pada tahun 2003 terdapat 3 sektor yaitu sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 126.32 sektor bangunan konstruksi sebesar 111.26 selanjutnya perdagangan hotel dan restoran sebesar 111.61 dan 3 sektor terendahnya yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 105.60 sektor jasa-jasa lainnya sebesar 106.39 terakhir sektor listrik dan air minum sebesar 106.86. dengan nilai PDRB Konstan terus meningkat dari tahun 2000-2003.

4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya PDRB sangat menentukan maju mundurnya suatu perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran dari tahun 1994-2013



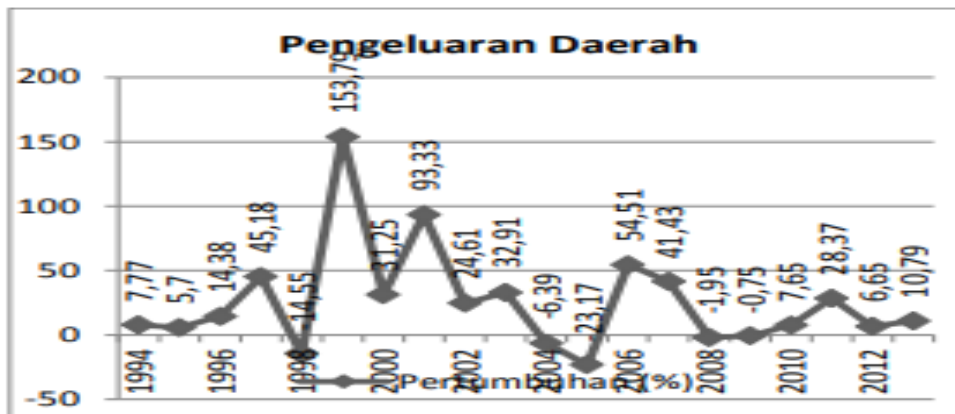
Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Aceh Tengah Tahun 1994 laju pertumbuhan PDRB ADHK adalah 9,37 persen kemudian terus menurun pada tahun-tahun berikutnya menjadi 0,34 persen pada tahun 1999. Seperti yang kita ketahui krisis moneter dan konflik berkepanjangan yang terjadi pada masa tersebut menyebabkan produktivitas masyarakat menjadi rendah yang akhirnya ikut mempengaruhi perekonomian di Provinsi Aceh dan juga Kabupaten Aceh Tengah tentunya. Tetapi pada tahun 2000, laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Aceh Tengah meningkat jauh sebesar 56,65 persen dan merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Hal ini dipengaruhi oleh produksi pertanian seperti tanaman kopi. Meningkatnya harga jual kopi tentunya berpengaruh pada meningkatnya aktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat, karena kopi yang dihasilkan selain untuk dipasarkan ke tingkat lokal juga sebagian besar ada yang diekspor keluar negeri dengan nilai ekspor yang tinggi. Begitu juga dengan tanaman sayur-sayuran, palawija dan

hortikultura seperti kentang, tomat, cabai dan lain-lain. (www. Kemendagri.go.id). Hal ini tentu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu. Pertumbuhan ekonomi kembali menurun pada tahun tahun berikutnya bahkan mencapai minus 8,71 persen pada tahun 2002. Selanjutnya pertumbuhan PDRB ADHK kembali meningkat 3,03 persen pada tahun 2003 dan terus meningkat menjadi 15,38 persen pada tahun 2006. Kemudian PDRB ADHK mulai turun ditahun 2007 dan kembali berfluktuasi sampai tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum pemekaran adalah sebesar 9,46 persen. Sedangkan setelah dimekarkan tumbuh rata-rata sebesar 4,84 persen.

Dalam neraca APBD, pengeluaran pemerintah secara garis besar dikelompokkan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Rata-rata pertumbuhan pengeluaran daerah Kabupaten Aceh Tengah sebelum pemekaran yaitu dari tahun 1994 s/d 2003 adalah sebesar 39,44 persen. Sedangkan setelah dimekarkan yaitu dari tahun 2004 s/d 2012 pengeluaran daerah tumbuh rata-rata sebesar 11,71 persen.

Gambar 4.2

**Pertumbuhan Pengeluaran Daerah (PD) Kabupaten Aceh Tengah
Sebelum dan Sesudah Pemekaran**



Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pengeluaran daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 1994 sampai 2012 fluktuatif turun naik. Pertumbuhan pengeluaran daerah tertinggi terjadi pada tahun 1999 yaitu 153,79 persen dan terendah pada tahun 2005 yaitu minus 23,17 persen.

Untuk itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah, diperlukan kemampuan, kecermatan serta kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga dapat menciptakan keadaan ekonomi, politik, dan hukum yang kondusif sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memicu pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain jumlah penduduk dapat menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi bukan sebagai pemacu karena banyak faktor penyebab antara lain ketersediaan lapangan kerja yang tidak mendukung sehingga laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan dampak pengangguran dimana pengangguran dapat menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga aktivitas ekonomi tidak berjalan lancar

yang akhirnya ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran daerah terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, untuk itu pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya harus mampu mengalokasikan belanja daerah secara efisien untuk kebutuhan public.(Abdullah, 2018)

4.3 Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Sektor Pariwisata Di Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang banyak memiliki potensi sektor pariwisata, mulai dari wisata budaya, alam, kesenian, tempat bersejarah. Secara umum potensi wisata yang ada di Aceh Tengah belum mempunyai dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut dapat kita lihat pada gambar dibawah yang menjelaskan tentang daftar hotel/losemen/mess/penginapan di kabupaten aceh tengah dan juga menjelaskan tentang nama-nama tempat wisata yang telah diresmikan oleh pemerintah kabupaten aceh tengah.(Ilmiah et al., 2018). Berikut ini terdapat daftar Hotel/Losmen/Mess/Penginapan jumlah tamu pada saat sebelum dilakukan pemekaran wilayah yaitu pada tahun 2000-2003.

Tabel 4.10

Daftar Hotel/Losemen/Mess/Penginapan dan Jumlah Tamu Di Kabupaten Aceh Tengah Sebelum Pemekaran

No	Kecamatan	Alamat	Jumlah kamar	Jumlah ranjang	Tenaga kerja	Jumlah tamu	
						Asing	Indonesia
1	Penginapan batang ruang	Jln. Makamah no 5 takengon	10	23	4	-	633
2	Mess libra indah	Jln. Yos sudarso bebesen	11	24	4	-	415

3	Lossmen pariwisata	Jln terminal takengon bebesen	10	21	5	-	340
4	Hotel mahara	Jln. Sengeda kota takengon	10	10	3	-	365
5	Losmen fajar	Jln. Mahkama kota takengon	22	29	5	-	217
6	Hotel triarga	Jln. Pasar inpres bebesen	28	44	5	-	9250
7	Hotel renggali	Jln. Ujung baro kota takengon	30	53	7	-	3153
8	Penginapan umah beroker	Jln. Kampung baro kota takengon	15	26	4	-	239

Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Aceh Tengah

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tercatat hanya ada 8 jenis usaha penginapan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sebelum pemekaran wilayah. Yang tercatat bahwa belum adanya wisatawan asing yang masuk pada tahun-tahun tersebut, dan wisatawan hanya berasal dari Indonesia dengan jumlah penginapan terbanyak pada tahun sebelum pemekaran yaitu di hotel Triarga dengan jumlah pengunjung 9.250 orang, dan jumlah pengunjung hotel paling sedikit yaitu hotel Umah Beroker dengan jumlah 239 orang. Sarana dan fasilitas pada saat itu juga belum memadai, sehingga menyebabkan rendahnya minat wisatawan yang ingin menginap, serta belum adanya sistem pengiklanan atau promosi.

Tabel 4.11
Daftar Hotel/Losemen/Mess/Penginapan dan Jumlah Tamu
Di Kabupaten Aceh Tengah Sesudah Pemekaran

No	Kecamatan	Alamat	Jumlah kamar	Jumlah ranjang	Tenaga kerja	Jumlah tamu(orang)	
						Asing	Indonesia
1	Renggali Hotel	Jln. Takengon Bintang	30	30	17	415	21.790
2	Mahara Hotel	Jln. Sengeda No 568	26	26	7	365	18.455
3	Grand Penemas	Jln. Komplek Terminal Tkn	48	48	8	330	20.389
4	Triarga Hotel	Jln Pasar Impres	30	30	8	639	17.440
5	Linge Land Hotel	Jln. Yos Sudarso	32	32	8	550	18.990
6	Hotel Bunda	Jln. Sp.4 Reje Bukit	18	18	7	280	15.641
7	Wisma Umah Opat	Jln. Biruen-Takengon	17	17	5	112	12.091
8	Losmen Fajar	Jln. Mahkamah No.8	15	15	3	230	10.302
9	Batang Ruang	Jln.Sentosa No 7	7	7	7	100	369
10	Libra Indah	Jln. Yos Sudarso No 267	15	15	5	115	9784
11	Mutiara	Jln. Lembaga, Blang Kolak 2	11	11	3	-	459
12	Hotel Merlin	Jln. Yos Sudarso, Tan Saril	15	15	3	89	799
13	Arizona Hotel	Jln. Sengeda Takengon	15	15	5	50	1089
14	Wisma Intan	Jln. Mersah, Kp.Merah Mersah	9	9	3	-	4579
15	Bayu Hill	Jln. Lebe Kader	35	35	8	9176	18.674
16	Syariah Darussalam	Jln. Lintang Takengon	15	15	5	-	11.226
17	Penginapan Nacara	Jln. MJM	10	10	3	-	9.099

18	Wisma Harapan Jaya	Jln. Lintang Takengon	15	15	5	120	7.982
19	Hotel Jeddah	Jln. Sengeda No.1 Tkn	15	15	3	-	10.876
20	Wisma Beranang	Jln. Abdul Wahab Kec. Kebayakan	10	10	3	-	9.789
21	Arizone Guest House	Jln. Gempar Alam Kec. Kebayakan	16	16	4	-	10.079

Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Aceh Tengah

Dapat dilihat dari gambar diatas maka terdapat 21 jenis usaha penginapan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah penghuni terbanyak yaitu Hotel Renggali Jln. Takengon Bintang dengan jumlah tamu sebanyak 21.790 dan jumlah tamu asing sebanyak 415 orang dan jumlah tamu yang paling sedikit dikunjungi yaitu Hotel Batang Ruang Jln, Sentosa No.7 dengan jumlah hunian asing sebanyak 100 orang dan jumlah hunian dari wisatawan Indonesia sebanyak 369 orang. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang meliputi aspek fisik lingkungan, sosial ekonomi dari objek dan daya tarik wisata dengan profesionalisme dan pola pengelolaan yang siap mendukung kegiatan usaha pariwisata dengan mampu memanfaatkan potensi objek dan daya tarik wisata secara lestari. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan produktifitas pengelolaan potensi kawasan objek wisata dan daya tarik wisata yang potensial serta alternatif usaha pariwisata yang kreatif dan inovatif tentunya akan berdampak baik kepada pengelola wisata, wisatawan, masyarakat sekitar dan pemerintah

Tabel 4.12
Daftar Nama Tempat Wisata
Di Kabupaten Aceh Tengah sebelum pemekaran

No	Nama tempat wisata	Alamat
----	--------------------	--------

1	Agro Wisata (Kebun Nanas Pegasing)	Pegasing Kec.Pegasing
2	Ujung Paking	Kec.Bintang
3	Air Terjun Mangaya	Kampung Mengaya Kec.Bintang
4	Air Terjun Sumung	Kampung Uning Kec. Linge
5	Air Terjun Toweran	Kampung Toweran Kec.Lot Tawar
6	Atu Belah	Kampung Penarun Kec.Linge
7	Atu Berukum/Atu Canang	Kampung Serule Kec.Bintang
8	Atu Tamon Resort	Kampung Mendale Kec.Kebayakan
9	Atu Tingok	Kampung Dedalu Kec.Lot Tawar
10	Batur Teluk Mepat	Kampung Mendale Kec.Kebayakan
11	Biang Bebangka	Pegasing Kec.Pegasing
12	Bur Gayo	Kampung Bale Hakim Kec. Lot Tawar
13	Dermaga Lukup Penalam	Kampung Dedalu Kec.Lot Tawar
14	Dermaga Toweran Toa	Kampung Toweren Kec Lot Tawar
15	Gayo Waterpark	Pegasing Kecamatan Pegasing
16	Gua Loyang Koro	Kampung Toweren Kec. Lot Tawar
17	Kuburan Reje Linge	Kampung Buntul Linge Kec. Linge
18	Loyang Datu	Kampung Mobet Kecamatan Linge
19	Loyang Putri Pukes	Kampung Mendele Kec. Kebyakan
20	Lot Kucang Gegarang	Kec, Jagong Jeget
21	Lot Kucak Jagong	Kec. Jagong Jeget
22	Makam Muyang Biang Bike	Kec. Ketol
23	Makam Muyang Gerpa	Kec Bintang
24	Makam Muyang Sengeda	Kec. Bintang
25	Pantan Terong	Kampung Bahgie Kec. Bebesen
26	Pantai Gemasih	Kampung Kelitu Kec. Bintang
27	Pantai Ketibung	Kampung Kelitu Kec. Bintang
28	Pantai Toweren	Kampung Toweren Kec. Lot Tawar
29	Pantai Monyet	Kampung Genuren Kec. Bintang
30	Pesanggrahan Singa Mata	Kampung Bukit Sama Kec. Kebayakan
31	Sungai Merah Muyang	Kampung Merah Muyang Kec Atu Lintang
32	Totor Simpil Penarun	Kampung Owaq Kec.Linge
33	Tugu 45 Bur Gayo	Kampung Dedalu Kec. Lot Tawar
34	Tugu Samfrudin Prawira Negara	Kampung Bius Kec. Bies
35	Ujung Gempulo	Kampung Mengaya Kec. Bintang
36	Ujung Ulung	Kec. Bintang
37	Umah Pitu Ruang Lingo	Kampung Buntul Ling Kec Linge
38	Umah Pitu Ruang Kemili	Kampung Kemili Kec. Bebesen
39	Wih Porak Ilus	Pegasing Kec. Pegasing
40	Wisata Danau Laut Tawar	Kec. Lut Tawar
41	Damaran Baru Eco-Village	Kp.Damaran Baru, Kec. Lampahan, Kab. Bener Meriah
42	Paralayang	Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah

43	Lut Kucak	Kp. Waq Pondok Sayur, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah
44	Air Terjun Berawang Tampu	Dusun Menderek, Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Kab. Bener Meriah
45	Bener Meriah Bike Adventure	Kp. Simpang 3 Redelong, Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
46	Elephant Rafting	CRU DAS Kreung Puesangan, Km. 40 Kp. Negeri Antara, Kab. Bener Meriah
47	Air Terjun Putri Pintu	Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah
48	Air Terjun Tansaran Bidin	Kp. Tansaran Bidin, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah
49	Umah Pintu Ruang	Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah
50	Radio Rimba Raya	Kp. Rimba Raya, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah

Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Aceh Tengah

Dari gambar yang kita lihat diatas bahwa ada terdapat 40 tempat wisata yang telah diresmikan oleh pemerintah kabupaten aceh tengah. Walaupun beragam obyek wisata di kawasan wisata seperti pada tabel diatas. Bahwa semua obyek wisata belum memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jelas sarana pendukung terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah dari pariwisata sangat kurang. Pada tabel diatas semua objek wisata masih milik Kabupaten Aceh Tengah dan sesudah dilakukan pemekaran wilayah otomatis pariwisata tersebut diambil alih oleh Kabupaten baru hasil dari pemekaran wilayah yaitu Kabupaten Bener Meriah, adapun wisata yang sekarang menjadi bagian dari Kabupate Aceh Tengah terdapat pada tabel di bawah ini:

No	Nama tempat wisata	Alamat
----	--------------------	--------

1	Damaran Baru Eco-Village	Kp.Damaran Baru, Kec. Lampahan, Kab. Bener Meriah
2	Paralayang	Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah
3	Lut Kucak	Kp. Waq Pondok Sayur, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah
4	Air Terjun Berawang Tampu	Dusun Menderek, Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Kab. Bener Meriah
5	Bener Meriah Bike Adventure	Kp. Simpang 3 Redelong, Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
6	Elephant Rafting	CRU DAS Kreung Puesangan, Km. 40 Kp. Negeri Antara, Kab. Bener Meriah
7	Air Terjun Putri Pintu	Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah
8	Air Terjun Tansaran Bidin	Kp. Tansaran Bidin, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah
9	Umah Pintu Ruang	Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah
10	Radio Rimba Raya	Kp. Rimba Raya, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah

Data diatas adalah objek pariwisata yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya terdapat tabel tentang kondisi jalan untuk menuju objek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, untuk akses jalan menuju objek wisata memang ada beberapa objek yang jalannya masih sulit untuk di akses contohnya pada objek wisata Atu Belah yang beralamatkan di Kampung Penarun Kec. Linge wisata Atu Belah ini memiliki kondisi jalan yang sangat memprihatinkan sehingga dikala musim hujan sangat sulit untuk di akses dan di lalui oleh pengunjung, pengunjung banyak berharap untuk wisata religi Atu Belah lebih di perhatikan oleh pemerintah daerah.

Tabel 4.13
Kondisi jalan menuju objek
wisata Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2000-2020

Tahun	Tanah (Km)	Kerikil (Km)	Aspal (Km)
2000-2005	432,64	375,15	117,15
2006-2010	372,70	305,09	280,90
2011- 2015	215,90	211,19	355,19
2015- 2020	117,20	111,70	750,90

Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Aceh Tengah

Dapat dilihat pada tabel bahwa pada tahun 2000-2005 pengaspalan jalan menuju lokasi objek wisata tercatat 117,15 km, dan pada tahun 2015-2020 pengaspalan jalan hampir merata yaitu sepanjang 750,90 km. Dengan kondisi jalan yang baik maka dapat memudahkan wisatawan berkunjung ke objek wisata. Dari pendapatan daerah yang ada, kontribusi sektor pariwisata dalam struktur PAD dapat dilihat pada tabel 4.14:

Tabel 4.14
Sarana Pendukung Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013-2019

Tahun	Jenis Usaha Penerimaan Pad	Target Pad	Penerimaan Sektor Pariwisata	Pencapaian (%)
2013	Pajak Hotel	405.00.00	206.846.170	15,07
	Pajak Restoran	990.000.000	1.190.163.247	120,22
	Pajak Hiburan	98.500.00	20.245.000	20,55
2014	Pajak Hotel	300.000.000	244.394.512	81,46
	Pajak Restoran	1.000.000.000	1.333.952.333	133,4
	Pajak Hiburan	98.500.000	7.925.000	8,05
2015	Pajak Hotel	505.000.000	206.846.170	56,31
	Pajak Restoran	1.285.000.000	1.190.163.247	114,15
	Pajak Hiburan	83.500.000	20.245.000	3,07
2016	Pajak Hotel	600.500.000	416.549.180	79,12
	Pajak Restoran	1.285.000.000	1.310.143.000	118,14
	Pajak Hiburan	98.000.000	20.245.000	3,07
2017	Pajak Hotel	709.000.000	426.112.000	86,12
	Pajak Restoran	1.400.000.000	1.400.000.000	123,21
	Pajak Hiburan	100.000.000	25.000.000	5,09
2018	Pajak Hotel	709.000.000	700.000.000	107,01

	Pajak Restoran	1.555.000.000	1.679.000.000	145,79
	Pajak Hiburan	120.459.000	25.679.114	5,11
2019	Pajak Hotel	1.220.000.000	900.509.000	109,05
	Pajak Restoran	1.609.238.190	1.770.000.000	180,76
	Pajak Hiburan	125.466.247	30.407.215	10,40

Dinas: Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Aceh Tengah (Efendi, M., Nuswantoro, P., & Tengah, A. (2019))

Dapat dilihat bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD dalam tujuh tahun dari sektor Pajak Hotel tahun 2013 sebesar 51.07% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2014 sebesar 81.46% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2015 sebesar 56.31% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2016 sebesar 79,12% dari PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2017 sebesar 86,12% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2018 sebesar 107,01% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2019 sebesar 109,05% meningkat dari tahun sebelum-sebelumnya yang sudah ditetapkan sesuai target PAD . Dari sektor pajak Restoran juga dapat dilihat tahun 2013 sebesar 120.22% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2014 sebesar 133.4% dari target PAD yang ditetapkan, tahun 2015 sebesar 114.15% dari target PAD yang ditetapkan, tahun 2016 sebesar 118,14% dari target PAD yang ditetapkan, tahun 2017 sebesar 123,21% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2018 sebesar 145,79% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2019 sebesar 180,76% dari target yang sudah ditetapkan tersebut. Dari sektor restoran juga dapat dilihat tahun 2013 sebesar 20.55% dari target PAD yang ditetapkan, tahun 2014 sebesar 8.05% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2015 sebesar 3.07% dari target PAD yang ditetapkan, tahun 2016 sebesar 3,07% dari target PAD yang sudah ditetapkan tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2017 sebesar 5,09% dari target PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2018 sebesar 5,11% dari PAD yang sudah ditetapkan, tahun 2019

sebesar 10,40% dari target PAD yang sudah ditetapkan. Pedapatan asli daerah dari sektor ritribusi juga dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

tabel 4.15
Retribusi Parkir pada Objek Pariwisata terhadap PAD
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013-2019

Tahun	Target Pad	Realisasi	Pencapaian (%)
2013	60.000.000	3.690.000	6,15
2014	60.000.000	10.400.000	17,33
2015	50.000.000	5.000.000	10,00
2016	57.000.000	7.450.000	12,90
2017	70.000.000	14.000.000	26,00
2018	72.000.000	14.402.000	26,60
2019	80.000.000	21.000.000	30,10

Dinas: Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Aceh Tengah (Efendi, M., Nuswantoro, P., & Tengah, A. (2019))

Berdasaraka tabel di atas dapat kita lihat bahwa di tahun 2013 retribusi hanya 6,15% dari target PAD yang ditentukan. Tahun 2014 retribusi hanya 17,33% dari target PAD yang ditentukan meningkat sedikit dari tahun sebelumnya, di tahun 2015 retribusi hanya 10,00% dari target PAD yang ditentukan, kembali menurun dari tahun 2014, di tahun 2016 retribusi tercatat 12,90% dari target PAD yang ditentukan meningkat sedikit dari tahun sebelumnya, di tahun 2017 retribusi tercatat 26,00% dari PAD yang ditentukan dan mengalami peningkatan beberapa persen dari tahun sebelumnya, di tahun 2018 retribusi tercatat 26,90% dari PAD yang ditentukan sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2019 retribusi tercatat 30,10% dari PAD yang ditentukan sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Naik turunnya jumlah kunjungan ke tempat wisata yang berada di seputaran Kabupaten Aceh Tengah dipengaruhi oleh promosi tempat wisata yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang, dimana informasi yang berkaitan dengan tujuan wisata seperti akses peta lokasi wisata, rute yang dilalui menuju objek wisata,

akomodasi, fasilitas, transportasi, catering service, pembelajaran (Mall/ Swalayan), komunikasi, keamanan, kebersihan, sarana ibadah. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dianggap berjalan sangat lambat bahkan ada yang menganggap tidak berhasil karena melihat bahwa objek wisata yang ada di seputaran Kabupaten Aceh Tengah sampai saat ini tidak ada perubahan, bahkan tergantung pemilik objek wisata itu saja yang mengelola dengan minimnya dana yang dimiliki, serta sarana dan prasarana yang masih kurang. (Efendi et al., 2019)

4.4 Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Sektor Pariwisata

Kabupaten Aceh Tengah merupakan kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk dikembangkan agar dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Beberapa destinasi wisata yang ada di Aceh Tengah antara lain Danau Lut Tawar, Pantan Terong, Bur Gayo, Bur Telege, Bur Rintis, Lancuk Leweng, Putri Pukes, Goa Manusia Purba Kala Mendale, Air Terjun Mengaya dan masih banyak yang lainnya. Semua objek pariwisata tersebut bisa dimanfaatkan dan dikembangkan dengan kebijakan pemerintah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, usaha pengembangan pariwisata perlu didukung oleh elemen-elemen penting yang melaksanakan fungsinya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang maksimal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah guna mewujudkan kepariwisataan yang maju dan berkelanjutan. Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di tengah-tengah provinsi Aceh memiliki topografi dominan wilayah

bergunung dan berbukit dengan ketinggian rata-rata bervariasi antara 200-2600 meter di atas permukaan laut. Dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah belum dapat memaksimalkan potensi yang ada. Hal itu terlihat dalam perumusan kebijakan daerah, Kabupaten Aceh Tengah masih belum memiliki peraturan tetap mengenai pengelolaan kepariwisataan. Kemudian belum adanya konsep dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan destinasi pariwisata. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Pasal 15 menyebutkan bahwa perintisan dan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan daerah pariwisata nasional dan pengembangan daerah. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya, memfasilitasi pengembangan daya Tarik wisata baru serta mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Regulasi tersebut seharusnya dapat menjadi landasan utama bagi pemerintah Aceh Tengah dalam membuat berbagai kebijakan yang mendorong pengembangan pariwisata. Objek pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah masih kurang maksimal pengembangannya oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini terjadi karena belum adanya konsep kebijakan pengembangan pariwisata dan pengelolaannya masih kurang koordinasi dan kerja sama baik antara pemerintah kabupaten Aceh Tengah dengan pemilik usaha pariwisata. Kurang maksimalnya pengelolaan dan pengawasan kepariwisataan tersebut sangat berdampak pada kepuasan masyarakat khususnya wisatawan yang berkunjung ke

destinasi wisata yang ada di Aceh Tengah. Permasalahan lainnya yaitu belum adanya regulasi dan rencana induk pengembangan kawasan pariwisata daerah menjadi penyebab pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum maksimal. Kemudian dari segi infrastruktur masih kurang memadai, antara lain terlihat pada kurang layaknya jalur yang akan ditempuh menuju destinasi wisata.

Kebijakan Pemerintah Aceh Tengah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata

Kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan, promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi (Goeldner dan Ritchie 2006). Menurut (Gee, 2000:28) Formulasi kebijakan pariwisata merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ingin mengembangkan atau mempertahankan pariwisata sebagai bagian yang integral dalam perekonomian. Gee lebih tegas mengatakan bahwa kebijakan umumnya mengacu pada rencana, keseluruhan tingkat tinggi yang mencakup tujuan dan prosedur. Untuk itu kebijakan publik, memperhitungkan hasil akhir yang diinginkan dari pemerintah dan metode untuk mencapai hasil tersebut. Kebijakan mewujudkan tujuan dan strategi yang telah diadopsi pemerintah sehubungan dengan pariwisata, pembangunan ekonomi, pekerjaan, hubungan politik, atau, kombinasi dari ketiganya. Karenanya keterlibatan sektor publik sangat penting dalam penentuan kebijakan pariwisata. Ada lima indikator peran sektor publik dalam kebijakan pengembangan pariwisata yaitu koordinasi, perencanaan, perundang-undangan dan peraturan, kewirausahaan dan stimulasi (Mill dan

Morrison 2000:27). Pertama, koordinasi, belum dijalankan Pemerintah Aceh Tengah dalam membangun pengembangan pariwisata, sebagian besar berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi dan tidak adanya arahan yang jelas dari Pemerintah Aceh Tengah, pelaku pariwisata serta stakeholder yang terkait. Semestinya, pemerintah harus berkoordinasi secara aktif dengan para pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan pariwisata sehingga Pariwisata Aceh Tengah berkembang dengan baik. Kedua, perencanaan, pariwisata terjadi dalam bentuk pengembangan, infrastruktur, promosi dan pemasaran, struktur (organisasi yang berbeda-beda) dan skala (internasional, nasional, lokal dan sektoral). Pemerintah Aceh Tengah sudah melakukan tahap perencanaan dengan membuat satu role model yaitu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPARDA) yang mana dibuat Bersama stakeholder yang terkait. Tetapi dalam pelaksanaan perencanaan pariwisata di Aceh Tengah belum berjalan secara maksimal, dikarenakan belum adanya status hukum yang jelas dari RIPPARDA, seharusnya hal seperti ini harus berjalan efisien sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan pelaku pariwisata. Ketiga, Peraturan dan perundangundangan, Pemerintah Aceh Tengah Belum memiliki Kebijakan baik Peraturan Bupati dan Qanun dalam pengembangan pariwisata bisa dilihat pariwisata berjalan sendiri dengan inisiatif masyarakat. Seharusnya, dengan adanya regulasi pengembangan Pariwisata Aceh Tengah yang secara hukum sudah sah maka percepatan pembangunan dan pengembangan akan cepat tercapai. Keempat, kewirausahaan, pemerintah berkewajiban mengembangkan wirausaha dengan mendukung penuh bentuk usaha pariwisata baik dari pembinaan usaha, akses jalan, fasilitas umum, dan promosi destinasi wisata yang di kembangkan oleh pelaku usaha sektor pariwisata. Kegiatan Wirausaha Pariwisata Aceh Tengah belum ada

pembinaan dalam mengembangkan produk usahanya, produk yang ditawarkan ialah inisiatif masyarakat dalam membuat produk/ oleh-oleh khas Aceh Tengah. Pemerintah Aceh Tengah berkewajiban membina usaha pariwisata ini karena merupakan pendukung dari pariwisata. Kelima, Stimulasi: Pemerintah Aceh Tengah tidak pernah memberikan dana bantuan dalam pengembangan pariwisata dikarenakan tidak ada pengajuan dalam perencanaan anggaran tentang pemberian batuan dana untuk destinasi pariwisata. Kebijakan Pengembangan Pariwisata dapat tercipta jika 5 (lima) hal tersebut tercapai. Dalam hal ini pengembangan pariwisata di Aceh Tengah belum berjalan dengan beberapa indikator kebijakan pengembangan pariwisata tersebut. Akan tetapi beberapa indikator sudah mulai akan dijalankan oleh pemerintah Aceh Tengah dalam memulai pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Dalam Pengembangan Pariwisata Setiap organisasi pasti merancang dan melakukan upaya maupun strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan pariwisata yang mengalami berbagai hambatan ketika menjalankan peran dan fungsinya. Berbagai hambatan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah:

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum memiliki RIPPARDA serta kebijakan yang mengatur pengembangan pariwisata, tidak adanya payung hukum yang jelas akan berdampak pada pengembangan pariwisata baik dari sisi perencanaan, koordinasi serta promosi yang akan dilakukan.
- b. Kepemilikan Lahan Dalam mengembangkan pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah terkendala oleh kepemilikan lahan, yang mana banyak destinasi yang ingin dikembangkan oleh dinas tetapi

dilapangan terjadi permasalahan bahwa lahan yang ingin dikembangkan dan dibangun infrastruktur dimiliki oleh masyarakat, ketika dinas ingin membeli lahan tersebut, harga dari lahan yang di beli tidak sesuai harga yang diinginkan masyarakat. Sebenarnya pemerintah bisa mengusulkan kepada masyarakat agar lahannya dihibahkan kepada pemerintah yang ingin dikembangkan menjadi destinasi pariwisata kemudian setelah dikembangkan pemilik lahan ditunjuk pemerintah menjadi pengelola destinasi wisata tersebut.

- c. Masyarakat Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah menilai pariwisata memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Mayoritas masyarakat belum menerima kedatangan para pelancong yang ingin berwisata karena ada anggapan lain dari masyarakat tentang pariwisata ini. Pemerintah berkewajiban membina dan mensosialisasikan masyarakat sadar wisata bahwa pariwisata tidak selalu membawa pengaruh negatif kepada masyarakat yang ada disekitar destinasi pariwisata.
- d. Sumber Daya Manusia Dalam mengembangkan pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah terkendala oleh kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Wisata hanya terdiri dari 9 pegawai. Padahal kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas cukup berat dan membutuhkan banyak personil untuk pengoptimalan pelaksanaan kegiatan. Apalagi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan berhubungan langsung dengan seluruh stakeholder bidang pariwisata. Banyak kegiatan yang dilakukan dilapangan dan sangat membutuhkan banyak pegawai

dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai berakibat pada kurang optimalnya aktualisasi dari peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan monitoring atau memberikan motivasi terhadap para pelaku wisata Kabupaten Aceh Tengah sehingga program hanya bersifat kegiatan tertentu seperti event tahunan. Selain itu kurang optimalnya juga aktualisasi peran untuk merangkul seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut dapat terlihat bahwa belum adanya kegiatan koordinasi atau evaluasi bersama yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Pariwisata.

- e. Keterbatasan Anggaran Anggaran merupakan hal yang penting untuk menentukan terselenggaranya program atau kegiatan. Tanpa adanya anggaran yang memadai maka program pun akan sulit dijalankan secara optimal. Dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah khususnya untuk bidang pembinaan, pembangunan infrastruktur, promosi dan pengembangan pariwisata Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu masalah di anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah ini masih bergabung dengan pemuda dan olahraga. (Tirahmah, Aidil Audria, Hamdani M. Syam, 2019)

Pada hakekatnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk membantu masyarakat di daerah lokasi objek pariwisata untuk mendapatkan kekuatan untuk mengambil keputusan dan tindakan. Pemberdayaan dan pengembangan semacam ini dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan

kekuatan dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan yang dilakukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah adalah membimbing masyarakat yang berada di sekitar objek pariwisata atau dengan kata lain pengelolaan objek pariwisata tersebut agar di laksanakan oleh masyarakat di daerah lokasi objek pariwisata. Swakelola dan swadaya ini adalah partisipasi yang paling maju. Dalam konteks ini, anggota komunitas mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut komunikasi. Kekuasaan ini tidak hanya berkenaan dengan akses untuk memperoleh informasi dan untuk berperan dalam mengelola sarana yang ada pada lokasi objek pariwisata. Prinsip partisipasi dalam pengembangan objek pariwisata bukan sebatas proses sekedar hadir, memberikan pendapat atau hanya berdasarkan persepsi pemerintah atau sepihak dari masyarakat saja. Sangat rasional jika masyarakat di sekitar pengembangan objek pariwisata belum mau terlibat dalam berbagai program pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya kegiatan penyuluhan karena sejak awal masyarakat tidak terlibat dalam menentukan kegiatan yang diprogramkan. Terkait dengan hal ini, proses aksi sosial dan proses pengambilan keputusan dalam model adopsi inovasi dapat dimodifikasi. Dalam hal ini partisipasi masih ditekankan hanya pada pelaksanaan ketimbang pelibatan masyarakat saat perencanaan, bahkan pada saat pelaksanaan sekarang ini tampak bahwa prinsip partisipasi bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan. Penerapan metode partisipasi memerlukan proses yang bertahap. Penumbuhan partisipasi perlu dimulai dengan fasilitasi pada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan yang bersangkutan pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus untuk memperbaiki pengelolaan objek pariwisata yang sudah ada sebelumnya. Kegiatan pembangunan

objek pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah tidak terlepas dari daya dukung lingkungan, keberlangsungan sumber daya alam dan dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ketersediaan sumber daya alam di daratan seperti hutan, bahan tambang, dan mineral serta lahan pertanian produktif semakin menipis sedangkan kebutuhan penduduk terus bertambah sejalan dengan jumlah penduduk. Untuk pendekatan dan konseptual dan partisipasi masyarakat maka dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu pandangan masyarakat terhadap wisata, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan elemen-elemen masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata. Dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah mencoba menerapkannya dalam kegiatan dalam bentuk desain yang berbeda, diantaranya:

- (1) stimulasi minat masyarakat yaitu inisiatif dalam komunitas masyarakat mulai berkembang pada tahap awal dalam ide baru dan praktek
- (2) inisiasi yaitu kelompok masyarakat mulai mempertimbangkan ide baru atau praktek dan alternatif dalam implementasi
- (3) legitimitasi yaitu merupakan tahap saat tokoh masyarakat bermusyawarah dalam memutuskan akan meneruskan program pariwisata tindakan atau tidak
- (4) keputusan bertindak adalah rencana spesifik tindakan mulai dibangun
- (5) aksi yaitu penerapan rencana.

Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah objek pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah bukanlah suatu pekerjaan mudah, tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi isu yang dihadapi saja, tetapi perlu diwujudkan beberapa aspek yaitu adanya aspek situasional, kolaborasi dan

evaluasi diri dari setiap unsur yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Untuk menumbuhkan kesadaran pada pembangunan pariwisata, Pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga ikut memberikan beberapa dampak positif terhadap masyarakat itu sendiri. Selain pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata juga ikut membentuk perilaku masyarakat sadar wisata di Kabupaten Aceh Tengah. Partisipasi bisa berupa pemanfaatan hasil-hasil penyuluhan (inovasi), lalu partisipasi akan lebih intensif secara bertahap, hingga akhirnya masyarakat mampu mandiri untuk mengelola kegiatannya dengan mobilisasi diri bagi masyarakat yang berada di sekitar objek pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksana teknis dalam artinya menyediakan tempat, sedangkan pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang berada di sekitar objek pariwisata, jadi pihak dinas hanya memberikan masyarakat bimbingan untuk pengelolaan aset Pemerintah Daerah. Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tengah masih memerlukan berbagai perangkat pengembangan yang memadai dan profesional, antara lain meliputi peraturan dan kebijakan serta pedoman-pedoman pengembangan yang seluruhnya dapat mendukung pencapaian keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Kemajuan yang dicapai dari pengembangan pariwisata yaitu dalam peningkatkan sektor ekonomi, di mana tiap program pengembangan wisata yang

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat melihat pengembangan pariwisata akan membuat kesempatan bagi pencari kerja untuk mendapatkan kerja dan terlibat secara langsung dalam upaya melestarikan pariwisata yang akan dikembangkan. Secara garis besarnya, peran aktif masyarakat untuk menjaga dan melestarikan pariwisata secara langsung berpengaruh akan kelangsungan kebudayaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan haruslah sejalan dengan kebudayaan setempat. Pengembangan kepariwisataan akan mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya adalah sektor lingkungan. Di mana dengan perencanaan yang tidak baik maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik pula. Pengembangan kepariwisataan dapat juga berpengaruh pada lingkungan, misalkan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pembaharuan suatu tempat objek wisata maka dibutuhkan lahan baru, maka dengan pembukaan area baru untuk pengembangan pariwisata secara langsung dan tidak langsung dapat merusak ekosistem lingkungan bila tidak adanya planning yang baik. Dari awal pengembangan pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, masyarakat akan terus bergerak dan membenahi setiap lini yang ada, karena pengelolaan sepenuhnya di berikan tanggung jawab kepada masyarakat, langkah kedua dari pergerakan ini dari masyarakat sendiri untuk mengembangkan potensi yang sudah ada di depan mata mereka. Adapun langkah utama yang dicanangkan oleh masyarakat adalah pembentukan kelompok.

Kebijakan Pemerintah Aceh Tengah dalam pengembangan pariwisata memiliki acuan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA). Belum disahkannya RIPPARDA tersebut berdampak pada

pengembangan pariwisata yang tidak terkoordinir dengan baik. Kebijakan pengembangan pariwisata Aceh Tengah masih belum mengarah kepada pengembangan pariwisata dan pariwisata berkelanjutan. Kemudian sinergitas antara Pemerintah Aceh Tengah dengan pelaku pariwisata belum terkoordinir dengan baik seharusnya antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku pariwisata menciptakan kerjasama yang baik untuk terwujudnya sinergitas dalam pengembangan pariwisata. Kebijakan pengembangan pariwisata Aceh Tengah akan tercapai jika RIPPARDA Aceh Tengah disahkan, kemudian perencanaan, koordinasi, peraturan/undang-undang, kewisusausahaan serta stimulasi/investasi pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata. Dalam konsep sustainable tourism development, ada 3 aspek yang dapat dikatakan pariwisata daerah berkelanjutan yaitu, Ecological Sustainability, Social Adaptability, Cultural Sustainability. Pariwisata Aceh Tengah belum memenuhi ketiga aspek tersebut dalam pariwisata berkelanjutan, dikarenakan dalam pengembangan dan perencanaan tidak memasukkan ketiga aspek tersebut. (Bintusy Syathi, 2020)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan

Dari data yang diperoleh dan diuraikan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan perekonomian dari sebelum dilakukan pemekaran dan sesudah dilakukannya pemekaran mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik. Begitu juga pembangunan wisata-wisata sudah berkembang baik dengan mengikuti trend kekinian menjadi daya tarik tersendiri hingga mengundang

masyarakat daerah maupun luar daerah untuk berwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah, diperlukan kemampuan, kecermatan serta kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga dapat menciptakan keadaan ekonomi, politik, dan hukum yang kondusif sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memicu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran daerah terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, untuk itu pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya harus mampu mengalokasikan belanja daerah secara efisien untuk kebutuhan public

2. Pembangunan sektor pariwisata sesudah pemekaran berjalan sangat lambat namun cukup baik dari sebelum pemekaran hal itu juga berdampak bagi perekonomian masyarakat semakin banyaknya hotel, cafe dan restaurant, serta pengelolaan pariwisata yang sudah mengikuti trend kekinian maka dapat banyak mengundang wisatawan untuk berkunjung dan meningkatnya pendapatan daerah setempat.
3. Objek pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah masih kurang maksimal pengembangannya oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini terjadi karena belum adanya konsep kebijakan pengembangan pariwisata dan pengelolaannya masih kurang koordinasi dan kerja sama baik antara pemerintah kabupaten Aceh Tengah dengan pemilik usaha pariwisata. Kurang maksimalnya pengelolaan dan pengawasan kepariwisataan tersebut sangat berdampak pada

kepuasan masyarakat khususnya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Aceh Tengah. Permasalahan lainnya yaitu belum adanya regulasi dan rencana induk pengembangan kawasan pariwisata daerah menjadi penyebab pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum maksimal. Kemudian dari segi infrastruktur masih kurang memadai, antara lain terlihat pada kurang layakanya jalur yang akan ditempuh menuju destinasi wisata.

5.2 saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat di rekomendasikan adalah:

1. Pemerintah Aceh Tengah selaku pengambil kebijakan sebaiknya pariwisata lebih di perhatikan, karena sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi saya harap pariwisata di Aceh Tengah dapat cepat berkembang dan di ketahuai oleh banyak orang.
2. Pemerintah Aceh Tengah harus lebih mengedepankan sektor pariwisata dengan tingginya objek pariwisata yang dapat meningkatnya pengunjung dan pendapatan masyarakat setempat.
3. Perekonomian Aceh Tengah mengalami peningkatan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, untuk itu pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya harus mampu mengalokasikan belanja daerah secara efisien untuk kebutuhan publik baik penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan potensi daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas penelitian ini dan menambahkan variable lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2018). *Analisis serapan anggaran belanja pemerintah kabupaten aceh tengah*. 4, 31–43.
- Bintusy Syathi, P. (2020). *Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Industri Kreatif Sektor Pariwisata (Studi Kasus : Kabupaten Aceh Tengah)*. 5(1), 37–45.
- Efendi, M., Nuswantoro, P., & Tengah, A. (2019). *PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PERSPEKTIF*. 5(September), 114–125.
- Ekonomi, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2019). *Analisis peningkatan retribusi daerah melalui pengembangan objek wisata di kabupaten aceh tengah*.
- Ilmiah, J., Jim, M., Kabupaten, E., & Tengah, A. (2018). *PENGARUH KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN ACEH TENGAH Iwan Bicer 1* , Eddy Gunawan 2 1)*. 3, 370–378.
- Pariwisata, J. I., Marie, A. L., Widodo, R. E., Tinggi, S., Trisakti, P., Tinggi, S., Manajemen, I., & Mary, S. (2020). *Analisis Faktor Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Tingkat Penginapan Hotel Terhadap Penerimaan*

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata pada Industri Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun. 25(3).*
- Suparmoko, M. (2016). Peranan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam Pembangunan. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 1–43.
<http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3960>
- Tirahmah, Aidil Audria, Hamdani M. Syam, M. (2019). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3, Nomor 4, Februari 2019
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP. *Ilmiah Mahasiswa FISIP UNSYIAH*, 3(4), 1–12.
- Universitas, P., Kuala, S., & Aunies, E. U. (2015). *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 12 Pages DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH menyebabkan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Aceh Tengah secara Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menyeluruh , yang meliputi : pembagian luas tahun 2009 s / d 2013 didomina*. 3(2), 10–21.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MELLIN APRILLIANI
N.P.M : 1705180016
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : RISET EKONOMI
Judul Penelitian : ANALISA POTENSI EKONOMI PARIWISATA
KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH PASCA
PEMEKARAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12-08-2021	- Perbaiki gambaran umum dalam format - Buat analisis taj yg ke-1 sesuai dgn koreksi - Analisis taj yg ke-2 sesuai dgn arahan	ln	
25-08-2021	- Tambahkan Kebijakan Pemekaran Wd pd bab 2 - Perhaluskan koreksi ² yg ada.	ln	
13-09-2021	- lihat koreksi yg ada dan perbaiki sesuai arahan.	ln	
15-09-2021	- Lengkapi abstrak - Perbaiki kesalahan ² pengetikan	ln	
16-09-2021	Telak selesai diperiksa dan sejujur untuk ujian skripsi.	ln	

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(DRA. HJ. LAILAN SAFINA HSB, M.Si)

Medan, September 2021

Disetujui
Dosen Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Senin, 07 Juni 2021** menerangkan bahwa:

Nama : Mellin Aprilliani
N.P.M. : 1705180016
Tempat / Tgl.Lahir : Takengon, 28 April 2000
Alamat Rumah : Jl. Mangan 8 Link 12 Mabar Hilir Gg. Bina Bersama No 273
JudulProposal : Analisa Potensi Ekonomi Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah
Provinsi Aceh Pasca Pemekaran Wilayah

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dra. Hj. Lailan Safina Hsb, M.Si*

Medan, Mellin Aprilliani

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dra. Hj. Lailan Safina Hsb, M.Si

Pembanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mulhitar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 172/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/17/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 17/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mellin Aprilliani
NPM : 1705180016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : adanya pengaruh pengembangan objek wisata dikabupaten Aceh Tengah pasca pemekaran wilayah

Rencana Judul : 1. analisa potensi ekonomi pariwisata kabupaten aceh tengah provinsi aceh pasca pemekaran wilayah
2. anaisis pengaruh lingkungan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan orang tua terhadap moralitas anak
3. analisis tingkat kebutuhan modal bagi umkm diselama masa pandemi

Objek/Lokasi Penelitian : masyarakat Aceh Tengah

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Mellin Aprilliani)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : **MELLIN APRILIANI**
NPM : **1705180016**
Program Studi : **EKONOMI PEMBANGUNAN**
Konsentrasi : **RISET EKONOMI**
Judul Penelitian : **ANALISA POTENSI EKONOMI PARIWISATA
KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH
PASCA PEMEKARAN**

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan	Paraf	Keterangan
23-02-2021	- Diskusi ttg penulisan bab 1 dan bab 1 b/d 5. - Cari jurnal yg berhubungan dgn kptl b/d 5.	h	
20-03-2021	- Perbaiki bab 1, 2 dan 3, sesuai dengan komentar yg ada	h	
21-04-2021	- Perbaiki definisi operasional - Masukkan daftar pustaka - Rapihan penjabaran, spasi dan margin tulisan	h	
17-05-2021	Koreksi penjabaran	h	
21-05-2021	Teluh selesai defenisi dan Acc untuk temenan proposal	h	

Medan, Mei 2021

Pembimbing

DRA. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Manajemen

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

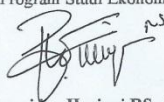
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 172/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/17/2/2021


Nama Mahasiswa : Mellin Aprilliani
NPM : 1705180016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset
Tanggal Pengajuan Judul : 17/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Lailan Safina
Judul**) : Analisa potensi ekonomi pariwisata
kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh pasca
Pemecaran wilayah.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan


(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 23. Februari 2021

Dosen Pembimbing


(Dr. Lailan Safina Hsf., M.Si.)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

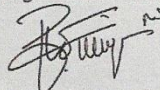


PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 172/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/17/2/2021


Nama Mahasiswa : Mellin Aprilliani
NPM : 1705180016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset
Tanggal Pengajuan Judul : 17/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Lailan Safina
Judul**) : Analisa potensi ekonomi pariwisata
kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh pasca
Pemerataan wilayah.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan


(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 23. february 2021

Dosen Pembimbing


(Dr. Lailan Safina Hsg, M.Si.)

Keterangan:

*) Dasi oleh Pimpinan Program Studi

**) Dasi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah Lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 172/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/17/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 17/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mellin Aprilliani
NPM : 1705180016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : adanya pengaruh pengembangan objek wisata dikabupaten Aceh Tengah pasca pemekaran wilayah

Rencana Judul : 1. analisa potensi ekonomi pariwisata kabupaten aceh tengah provinsi aceh pasca pemekaran wilayah
2. anaisis pengaruh lingkungan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan orang tua terhadap moralitas anak
3. analisis tingkat kebutuhan modal bagi umkm diselama masa pandemi

Objek/Lokasi Penelitian : masyarakat Aceh Tengah

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Mellin Aprilliani)